



**DETERMINAN KEMISKINAN DI PROVINSI
JAWA TENGAH**

TESIS

**diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Magister Ilmu Ekonomi**

**Oleh
Achyarnis Lilik Andrietya
0712516007**

**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI
PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2020**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis dengan judul “Determinan Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah” karya,

Nama : Achyarnis Lilik Andrietya

NIM 0712516007

Program Studi : Ilmu Ekonomi

telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian tesis.

Semarang, 16 Juni 2020

Pembimbing I,



Dr. Amin Pujiati, S.E., M.Si.
NIP. 196908212006042001

Pembimbing II,



Andryan Setyadharma, S.E., M.Si., Ph.D.
NIP. 197901022008121003

PENGESAHAN UJIAN TESIS

Tesis dengan judul “Determinan Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah” karya,

Nama : Achyarnis Lilik Andrietya

NIM : 0712516007

Program Studi : Ilmu Ekonomi

telah dipertahankan dalam sidang panitia ujian tesis Pascasarjana, Universitas Negeri Semarang pada hari Senin, tanggal 27 juli 2020

Semarang, 27 Juli 2020

Panitia Ujian

Ketua,



Dr. Eko Handoyo, M.Si.
NIP. 196406081988031001

Sekretaris,



Dr. Muhammad Khafid S.Pd., M.Si.
NIP. 197510101999031001

Penguji I,



Prof. Dr. Rusdarti, M.Si.
NIP. 195904211984032001

Penguji II,



Andryan Setyadhatma, S.E., M.Si., Ph.D.
NIP. 197901022008121003

Penguji III,



Dr. Amin Pujiati, S.E., M.Si.
NIP. 196908212006042001

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya

Nama : Achyarnis Lilik Andrietya

Nim 0712516007

Program Studi : Ilmu Ekonomi, S2

menyatakan bahwa yang tertulis dalam tesis yang berjudul “Determinan Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah” ini benar-benar karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya orang lain atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Atas pernyataan ini saya **secara pribadi** siap menanggung resiko/sanksi hukum yang dijatuhkan apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya ini.

Semarang, 16 Juni 2020

Yang membuat pernyataan,



Achyarnis Lilik Andrietya

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Moto

Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (QS. Al Baqarah 216)

Persembahan

Almamaterku Universitas Negeri Semarang

ABSTRAK

Andrietya, Achyarnis. 2020. "Determinan Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah".
Tesis. Studi Magister Ilmu Ekonomi. Pascasarjana. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Dr. Amin Pujiati, S.E., M.Si., Pembimbing II Andryan Setyadharma, S.E., M.Si., Ph.D.

Kata Kunci: IPM, PDRB, Tingkat Pengangguran, Investasi, Kemiskinan

Pemerintah Indonesia menyadari bahwa pembangunan nasional adalah salah satu upaya untuk menjadi tujuan masyarakat adil dan makmur. Sejalan dengan tujuan tersebut, berbagai kegiatan pembangunan telah diarahkan kepada pembangunan daerah khususnya daerah yang mempunyai kemiskinan relatif masih tinggi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah terdapat pengaruh antara IPM, PDRB, Tingkat Pengangguran, Investasi dan Dummy (Kawasan andalan dan bukan andalan) terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah. Berdasarkan data dari BPS, kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013-2018 masih berada di peringkat kedua setelah DI Yogyakarta di Pulau Jawa. Penelitian ini menggunakan data panel dengan pendekatan Fixed Effect Model (FEM). Sumber data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel IPM, PDRB dan Investasi berpengaruh negatif serta signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan variabel Tingkat Pengangguran dan Dummy (Kawasan andalan dan bukan andalan) berpengaruh negatif serta tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Secara simultan, menunjukkan bahwa secara keseluruhan variabel bebas dapat menunjukkan pengaruhnya terhadap kemiskinan. Koefisien determinasi R^2 sebesar 0,9899 yang berarti 98,99 persen kemiskinan dapat dijelaskan oleh variabel bebas. Sedangkan sisanya 1,01 persen dijelaskan oleh variabel di luar model.

ABSTRACT

Andrietya, Achyarnis. 2020. "Determinants of Poverty in Central Java Province".
A *Thesis*. Master of Economics. Postgraduate. Universitas Negeri
Semarang. Advisor I Dr. Amin Pujiati, S.E., M.Si., Advisor II Andryan
Setyadharma, S.E., M.Si., Ph.D.

Keywords: HDI, GRDP, Unemployment Rate, Investment, Poverty

The Indonesian government realizes national development is one of the efforts to achieve the goals of a just and prosperous society. In line with these objectives, various development activities have been directed towards the development of special regions that have relatively high poverty..

This study aimed to assess whether there is influence between HDI, GRDP, Unemployment, Investment and Dummy (mainstay and not mainstay areas) on Poverty in Central Java. Based on data from BPS, poverty in Central Java Province in 2013-2018 are in number 2 after DI Yogyakarta in Java. This research use panel data with a Fixed Effect Model (FEM) approach. Sources of data obtained from the Central Statistics Agency and the Directorate General of Indonesian Financial Balance.

The results showed that the variable HDI, GRDP and investment had a negative and significant effect on poverty in Central Java Province. While the Unemployment and Dummy variables (mainstay and not mainstay areas) have a negative and not significant effect on poverty in Central Java Province. Simultaneously, shows that the overall independent variable can show its effect on poverty. The coefficient of determination R^2 of 0.9899 which means 98.99 percent of poverty can be explained by the independent variable. While the remaining 1.01 percent is explained by variables outside the model.

PRAKATA

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya. Berkat karunia-Nya, peneliti dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Determinan Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah”. Tesis ini disusun sebagai salah satu persyaratan meraih gelar Magister Ilmu pada Pascasarjana Universitas Negeri Semarang.

Penelitian ini dapat diselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang telah membantu menyelesaikan penelitian ini. Ucapan terimakasih peneliti sampaikan pertama kali kepada para pembimbing: Dr. Amin Pujiati, S.E., M.Si. (Pembimbing I) dan Andryan Setyadharma, S.E., M.Si., Ph.D. (Pembimbing II) yang telah berkenan mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran, untuk membimbing baik di dalam perkuliahan maupun dalam menyelesaikan tesis ini.

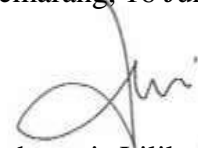
Ucapan terimakasih peneliti sampaikan juga kepada semua pihak yang telah membantu selama proses penyelesaian studi, diantaranya:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menimba ilmu dengan segala kebijakannya di Universitas Negeri Semarang.
2. Prof. Dr. Agus Nuryatin, M.Hum. Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang, yang telah memberikan kesempatan serta arahan selama pendidikan, penelitian, dan penulisan tesis ini.

3. Dr. Muhammad Khafid S.Pd., M.Si. Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan dan arahan dalam penulisan tesis ini.
4. Prof. Dr. Rusdarti, M.Si. selaku Penguji I yang sudah memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun.
5. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Ekonomi Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan pengetahuan dan pengalaman baru selama perkuliahan.
6. Seluruh staf karyawan Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang atas semua bantuannya.
7. Orang tua saya, Ibunda Khayaroh Indriyani dan Ayahanda dr. Lilik Guntur Sriyono yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan baik moril maupun materiil kepada saya sehingga penulisan tesis ini dapat berjalan dengan baik dan lancar.
8. Istri tercinta Desi Rinda Puspita Sari yang senantiasa mendoakan dan selalu mendukung sepenuh hati sehingga penulisan tesis ini dapat dikerjakan dengan lancar.
9. Adikku tercinta Orzyavella Lilik Pangestika yang selalu mendukung sehingga penulisan tesis ini dapat dikerjakan dengan baik.
10. Teman seperjuangan Magister Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Negeri Semarang angkatan tahun 2016 yang takkan terlupakan.

Peneliti sadar bahwa dalam tesis ini mungkin masih terdapat kekurangan, baik isi maupun tulisan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat peneliti harapkan. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat dan merupakan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 16 Juni 2020



Achyarnis Lilik Andrietya

DAFTAR ISI

Halaman

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN UJIAN TESIS.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
PRAKATA.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	16
1.3. Cakupan Masalah.....	18
1.4. Rumusan Masalah.....	19
1.5. Tujuan Penelitian.....	20
1.6. Manfaat Penelitian.....	20

BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA TEORITIS, KERANGKA BERFIKIR, DAN HIPOTESIS PENELITIAN

2.1. Kajian Pustaka.....	22
2.2. Kerangka Teoritis.....	38
2.2.1. Kemiskinan.....	38
2.2.2. Indeks Pembangunan Manusia.....	47
2.2.3. Produk Domestik Regional Bruto.....	50
2.2.4. Tingkat Pengangguran.....	53
2.2.5. Investasi.....	59
2.2.6. Kawasan Andalan dan Bukan Andalan.....	61
2.3. Kerangka Berfikir.....	64
2.4. Hipotesis Penelitian.....	71

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian.....	72
3.2. Lokasi Penelitian.....	72
3.3. Variabel Penelitian.....	72
3.4. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	75

3.5. Teknik Analisis Data	75
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Hasil Penelitian.....	83
4.1.1. Deskripsi Objek Penelitian	83
4.1.2. Deskripsi Variabel Penelitian	85
4.2. Hasil Analisis Uji Persyaratan.....	104
4.2.1. Uji Spesifikasi Model	104
4.2.2. Uji Pemilihan Model	105
4.2.3. Hasil Pengujian Statistik.....	107
4.3. Interpretasi Hasil dan Pembahasan	111
BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan.....	134
5.2. Saran	135
DAFTAR PUSTAKA	138
LAMPIRAN.....	146

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Persentase Penduduk Miskin di Pulau Jawa	7
Tabel 1.2. PDRB Harga Konstan 2010 dan Laju Pertumbuhan Jateng.....	10
Tabel 2.1. Nilai Minimum dan Maksimum Komponen IPM.....	49
Tabel 2.2. Kategori Peringkat IPM	50
Tabel 4.1. Klasifikasi Posisi Perekonomian Kabupaten/Kota di Jateng	103
Tabel 4.2. Hasil Estimasi Data Panel	105
Tabel 4.3. Uji <i>Chow Test</i>	106
Tabel 4.4. Uji <i>Hausman Test</i>	106
Tabel 4.5. Uji t- statistik.....	108
Tabel 4.6. Interpretasi Koefisien <i>Fixed Effect Model</i>	111

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Jumlah Penduduk dan Tingkat Kemiskinan di Indonesia	5
Gambar 1.2. Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.....	9
Gambar 1.3. Persentase Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah	12
Gambar 1.4. Persentase Tingkat Pengangguran di Jawa Tengah.....	13
Gambar 1.5. Investasi di Provinsi Jawa Tengah	15
Gambar 2.1. Lingkaran Kemiskinan Versi Nurkse.....	45
Gambar 2.2. Tipologi Klassen	63
Gambar 2.3. Kerangka Pemikiran.....	70
Gambar 4.1. Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota Jawa Tengah.....	87
Gambar 4.2. Persentase Kemiskinan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah	88
Gambar 4.3. Rata-rata dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Jateng	89
Gambar 4.4. Nilai IPM Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah	90
Gambar 4.5. Rata-rata IPM Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.....	94
Gambar 4.6. Jumlah PDRB Kabupaten/Kota dan Rata-rata PDRB Jateng.....	95
Gambar 4.7. Laju PDRB Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.....	97
Gambar 4.8. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Jateng.....	99
Gambar 4.9. Investasi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah	101

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Jumlah Penduduk Miskin kabupaten/kota di Jawa Tengah.....	147
Lampiran 2: Nilai IPM kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.....	148
Lampiran 3: PDRB ADHK 2010 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah	149
Lampiran 4: Tingkat Pengangguran kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.....	150
Lampiran 5: Investasi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.....	151
Lampiran 6: Dummy	152
Lampiran 7: Hasil Output Perhitungan Regresi Utama	153
Lampiran 8: Hasil output E-views dengan pendekatan <i>Common Effect Model</i>	155
Lampiran 9: Hasil output E-views dengan pendekatan <i>Fixed Effect Model</i>	156
Lampiran 10: Hasil output E-views dengan pendekatan <i>Random Effect Model</i>	158
Lampiran 11: Hasil Output Uji <i>Chow Test</i> dan Uji <i>Hausman Test</i>	160

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perencanaan merupakan sebuah upaya untuk mengantisipasi ketidakseimbangan yang terjadi yang bersifat akumulatif yang artinya, perubahan yang terjadi pada sebuah keseimbangan awal dapat menyebabkan perubahan pada sistem sosial yang kemudian akan membawa sistem yang ada menjauhi keseimbangan semula. Perencanaan memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembangunan. Salah satu peran perencanaan adalah sebagai arahan bagi proses pembangunan untuk berjalan menuju tujuan yang ingin dicapai disamping sebagai tolok ukur keberhasilan proses pembangunan yang dilakukan. Sedangkan pembangunan sendiri dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) di tingkat nasional atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di tingkat daerah.

Pemerintah Indonesia menyadari bahwa pembangunan nasional adalah salah satu upaya untuk menjadi tujuan masyarakat adil dan makmur. Sejalan dengan tujuan tersebut, berbagai kegiatan pembangunan telah diarahkan kepada pembangunan daerah khususnya daerah yang relatif mempunyai kemiskinan yang terus naik dari tahun ke tahun. Pembangunan daerah dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan sesuai prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah dengan akar dan sasaran pembangunan

nasional yang telah ditetapkan melalui pembangunan jangka panjang dan jangka pendek. Oleh karena itu, salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan nasional adalah laju penurunan jumlah penduduk miskin.

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang selalu muncul dalam kehidupan masyarakat. Implikasi dari permasalahan kemiskinan dapat melibatkan keseluruhan aspek kehidupan manusia, walaupun kehadirannya seringkali tidak disadari oleh manusia yang bersangkutan (Suparlan dalam Ridzky, 2018:24).

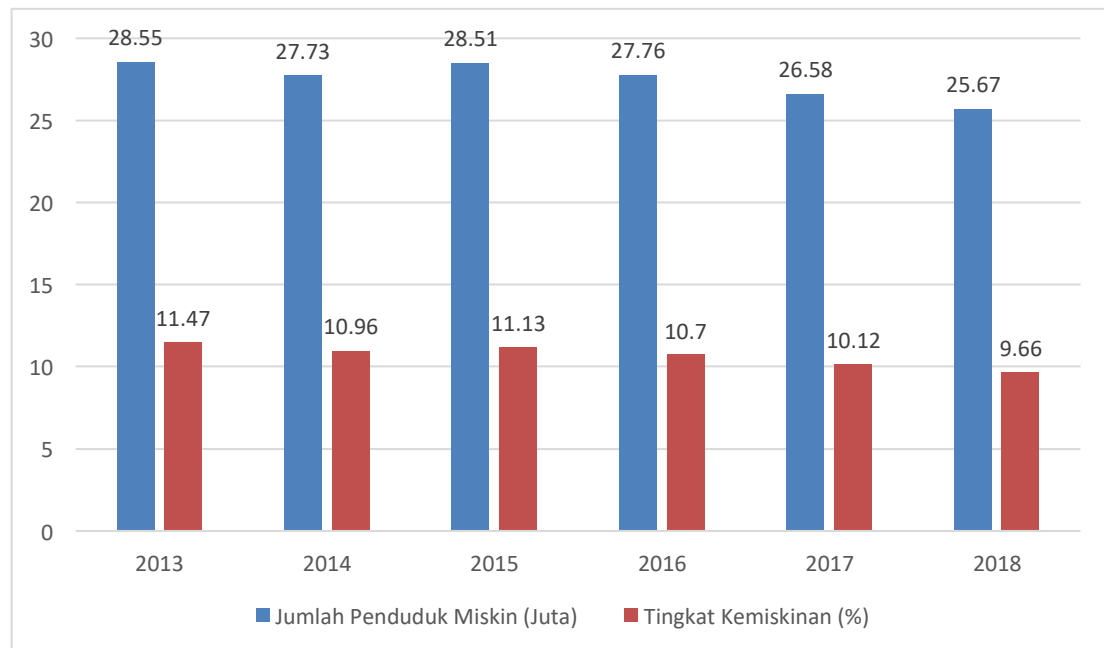
Mubyarto dalam Ridzky (2018:24) mengatakan bahwa, kemiskinan digambarkan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok atau kebutuhan hidup yang minimum yaitu sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan. Dalam definisi yang lebih luas, kemiskinan bersifat multidimensional, artinya kemiskinan adalah ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan manusia yang beraneka ragam yang selanjutnya dapat dipandang melalui berbagai aspek. Ditinjau dari aspek primer kemiskinan meliputi miskin terhadap aset, rendahnya partisipasi organisasi sosial politik, serta terbatasnya pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan aspek sekunder mencakup miskin terhadap jaringan sosial, rendahnya sumber-sumber keuangan dan terbatasnya informasi. Selanjutnya dimensi-dimensi kemiskinan tersebut termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, rendahnya penyediaan air bersih, terbatasnya perumahan layak huni, belum meratanya pelayanan kesehatan, tingkat pendidikan rendah, serta dari keseluruhannya saling berkaitan secara langsung maupun tidak langsung (Ala dalam Ridzky, 2018:24).

Rusdarti (2017:129) mengatakan bahwa Kemiskinan adalah masalah klasik yang terjadi sejak awal umat manusia dan menjadi masalah kelas dunia yang perlu ditanggulangi. Sebagai masalah aktual yang dihadapi dunia dari waktu ke waktu, kemiskinan masih menjadi fokus utama untuk diatasi. Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain tingkat pendapatan masyarakat, pengangguran, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan lokasi lingkungan. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik (Yunie, 2018:166).

Banyak dampak negatif yang disebabkan oleh kemiskinan, selain timbulnya banyak masalah-masalah sosial, kemiskinan juga dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi suatu negara. Kemiskinan yang tinggi akan menyebabkan biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan pembangunan ekonomi menjadi lebih besar, sehingga secara tidak langsung akan menghambat pembangunan ekonomi. Faktor lain yang sangat nyata tentang kemiskinan terutama di kota-kota besar Indonesia, dapat dilihat dari banyaknya warga masyarakat yang kekurangan makan dan minum, tidak memiliki tempat tinggal yang layak, bahkan digusur dari

pemukimannya, ribuan pekerja berunjuk rasa memprotes ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK), sikap dan perlakuan sewenang-wenang terhadap tenaga kerja wanita di luar negeri. Pemerintah pusat maupun daerah telah berupaya dalam melaksanakan berbagai kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan namun masih jauh dari induk permasalahan. Kebijakan dan program yang dilaksanakan belum menampakkan hasil yang optimal. Masih terjadi kesenjangan antara rencana dengan pencapaian tujuan karena kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan lebih berorientasi pada program sektoral (Yunie, 2018:166).

Permasalahan strategis di pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yakni masih tingginya angka kemiskinan jika di bandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa. Pembangunan jalan (tol) Trans Jawa salah satunya yang menjadikan pemerataan ekonomi di Jawa Tengah kurang merata sehingga angka kemiskinan masih tinggi, banyak UKM yang tutup di beberapa kabupaten di Jawa tengah karena adanya jalan (tol), sehingga mengurangi pendapatan masyarakat sekitar. Bagi Provinsi Jawa Tengah sendiri, kemiskinan merupakan isu strategis dan mendapatkan prioritas utama untuk ditangani. Oleh karena itu, kemiskinan menjadi tanggung jawab bersama, terutama pemerintah sebagai penyangga proses perbaikan kehidupan masyarakat dalam sebuah pemerintahan, untuk segera mencari jalan keluar dengan merumuskan langkah-langkah yang sistematis dan strategis sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Berikut gambar jumlah penduduk dan tingkat kemiskinan di Indonesia.



Gambar 1.1 Jumlah Penduduk dan Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2013-2018

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan Gambar 1.1 terlihat persentase penduduk miskin menurun dari 11,47 persen atau sekitar 28,55 juta jiwa pada tahun 2013 menjadi 9,66 persen atau sekitar 25,67 juta jiwa pada tahun 2018. Penurunan tingkat kemiskinan tersebut dicapai melalui perluasan penciptaan kesempatan kerja, peningkatan dan perluasan program pro-rakyat, serta peningkatan efektifitas penanggulangan kemiskinan melalui berbagai kebijakan program penanggulangan kemiskinan. Hal tersebut menandakan kesejahteraan masyarakat sudah lebih baik.

Berdasarkan isi dokumen strategi nasional penanggulangan kemiskinan (SNPK), bahwa pemerintah Indonesia menetapkan sembilan sektor kebijakan pembangunan dengan penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas utama. Target penanggulangan kemiskinan adalah dengan langkah pemenuhan kebutuhan dasar

masyarakat dibidang kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terutama kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi merupakan sesuatu yang sangat fundamental dalam konteks pengembangan kesejahteraan masyarakat (*welfare*), pembangunan manusia (*human development*) dan pengurangan kemiskinan (*poverty reduction*).

Berdasarkan pembagian wilayah, tingkat kemiskinan tertinggi di Pulau Jawa tahun 2013-2018 adalah Provinsi D.I Yogyakarta dengan rata-rata tingkat kemiskinan mencapai 13,34 persen. Peringkat kedua ditempati oleh Provinsi Jawa Tengah dengan rata-rata sebesar 12,99 persen, kemudian peringkat ketiga ditempati oleh Provinsi Jawa Timur dengan rata-rata sebesar 11,87 persen, peringkat keempat ditempati oleh Provinsi Jawa Barat dengan rata-rata sebesar 8,70 persen, peringkat kelima ditempati oleh Provinsi Banten dengan rata-rata sebesar 5,56 persen dan posisi terakhir ditempati oleh Provinsi DKI Jakarta dengan rata-rata sebesar 3,75 persen.

Dengan angka rata-rata tingkat kemiskinan 12,99 persen, di Provinsi Jawa Tengah masih terbilang tinggi karena tergolong *hard core* (>10 persen) yang mengindikasikan kebijakan pengentasan kemiskinan yang dijalankan pemerintah Provinsi masih belum berjalan dengan optimal. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum bisa mencapai target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2013-2018 yaitu menurunnya jumlah penduduk miskin menjadi 8-10 persen dan perbaikan distribusi pendapatan dengan perlindungan sosial yang berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat dan

perluasan kesempatan ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah serta terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat miskin secara bertahap.

Berbagai kebijakan, strategi dan kegiatan suatu penanggulangan kemiskinan yang bersifat langsung maupun yang bersifat tidak langsung telah dilaksanakan baik dalam skala nasional maupun lokal. Penanggulangan dan pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin serta hampir miskin dan mengurangi beban biaya bagi rumah tangga yang sangat miskin. Masalah-masalah kemiskinan yang terjadi lebih dipengaruhi oleh berbagai macam faktor yang saling berkaitan satu dan lainnya.

Tabel 1.1
Persentase Penduduk Miskin di Pulau Jawa
Tahun 2013-2018

Provinsi	Tingkat Kemiskinan (%)						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-rata
DKI Jakarta	3,72	4,09	3,61	3,75	3,78	3,55	3,75
Jawa Barat	9,61	9,18	9,57	8,77	7,83	7,25	8,70
Jawa Tengah	14,44	13,58	13,32	13,19	12,23	11,19	12,99
Jawa Timur	12,73	12,28	12,28	11,85	11,20	10,85	11,87
DI Yogyakarta	15,03	14,55	13,16	13,10	12,36	11,81	13,34
Banten	5,89	5,51	5,75	5,36	5,59	5,25	5,56

Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah

Situasi perekonomian yang semakin membaik menyebabkan berkurangnya penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan. Hal ini ditunjukkan dengan

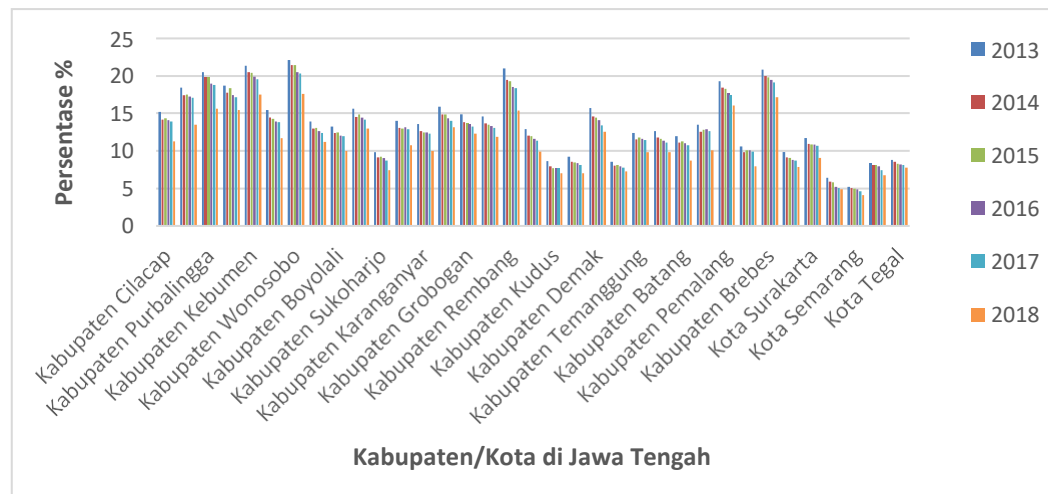
berkurangnya tingkat kemiskinan dari tahun ke tahun. BPS (2019), pada tahun 2013 tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah sebesar 14,44 persen, tahun 2014 menurun menjadi 13,58 persen, tahun 2015 turun lagi menjadi 13,32 persen, tahun 2016 sebesar 13,19 persen, tahun 2017 turun menjadi 12,23 persen dan pada tahun 2018 turun menjadi 11,19 persen.

Tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018 tertinggi ditempati oleh Kabupaten Wonosobo yaitu dengan rata-rata sebesar 20,56 persen, meskipun sudah mengalami penurunan setiap tahunnya dari 22,08 persen pada tahun 2013 menjadi 17,58 persen pada tahun 2018, sedangkan rata-rata persentase penduduk miskin terendah ditempati oleh Kota Semarang sebesar 4,81 persen. Oleh karena itu, upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan melalui pertumbuhan PDRB yang merupakan indikator pertumbuhan ekonomi dalam meminimalisir kesenjangan pertumbuhan ekonomi antar kabupaten atau kota juga diperlukan.

Jumlah penduduk miskin merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan kebijakan yang diambil pemerintah daerah untuk mensejahterakan masyarakatnya. Kesejahteraan masyarakat suatu negara atau daerah dapat dilihat dari pemerataan PDB di tingkat nasional atau PDRB di tingkat daerah. PDRB merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, semakin tinggi PDRB suatu daerah maka semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut.

Pertumbuhan ekonomi merupakan kunci dari penurunan kemiskinan di suatu wilayah. Dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat di masing-masing provinsi menghasilkan bahwa pemerintah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan. PDRB merupakan

salah satu indikator pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, PDRB adalah nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode. Semakin tinggi PDRB suatu daerah, maka semakin besar pola potensi sumber penerimaan daerah tersebut.



Gambar 1.2 Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah

Pertumbuhan ekonomi atau peningkatan PDRB merupakan salah satu ukuran dan indikasi penting untuk menilai keberhasilan dari pembangunan ekonomi suatu daerah ditinjau dari sisi ekonominya. Namun demikian tingginya PDRB tidak menjamin bahwa seluruh penduduk disuatu wilayah telah menikmati kemakmuran. PDRB hanya merupakan gambaran secara umum dari kesejahteraan masyarakat. Membaiknya indikator pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap masalah kemiskinan yang menjadi isu penting. PDRB sering digunakan sebagai indikator pembangunan. Semakin tinggi PDRB suatu daerah, maka semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut

dikarenakan semakin besar pendapatan masyarakat daerah tersebut (Thamrin dalam Alhudori, 2017:115).

Hal ini berarti juga semakin tinggi PDRB semakin sejahtera penduduk suatu wilayah. Dengan kata lain jumlah penduduk miskin akan berkurang. PDRB merupakan data statistik yang merangkum perolehan nilai tambah yang tercipta akibat proses produksi baik barang ataupun jasa di suatu wilayah pada satu periode tertentu, biasanya setahun atau triwulan tanpa memperhatikan asal pelaku produksinya PDRB merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang dapat digunakan untuk melihat tingkat perkembangan dan struktur perekonomian di suatu daerah.

Tabel 1.2

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

Tahun	PDRB ADHK 2010 (Juta)	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)
2013	20.761.489	5,11
2014	21.806278	5,27
2015	23.003.072	5,47
2016	24.259.359	5,25
2017	25.526.582	5,26
2018	26.878.850	5,31

Sumber: Badan Pusat Statistik

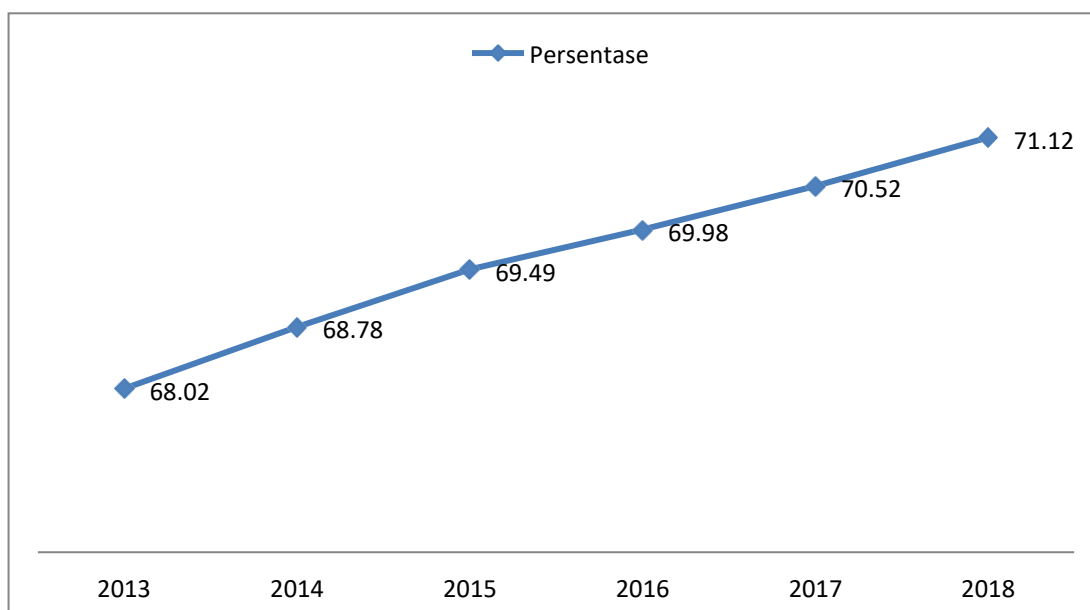
Laju pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Tengah tahun 2016 mencapai 5,25 persen, lebih lambat dibandingkan tahun 2015 dengan laju pertumbuhan 5,47 persen. Penurunan tersebut disebabkan kondisi perekonomian global yang belum mengalami perbaikan yang signifikan. Dari sisi sektoral, perlambatan terjadi pada sektor industri pengolahan, serta sektor perdagangan, hotel dan restoran. Laju pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh sektor informasi dan komunikasi. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan satu-satunya sektor yang mengalami kontraksi (BPS, 2019).

Paradigma pembangunan yang sedang berkembang saat ini adalah pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan pembangunan manusia. Salah satu tolak ukur yang digunakan dalam melihat kualitas hidup manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diukur melalui kualitas tingkat pendidikan, kesehatan dan ekonomi (daya beli). Kualitas sumber daya manusia dapat menjadi faktor penyebab terjadinya penduduk miskin. Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan berakibat pada rendahnya produktivitas kerja dari penduduk. Produktivitas yang rendah berakibat pada rendahnya perolehan pendapatan. Sehingga dengan rendahnya pendapatan menyebabkan tingginya jumlah penduduk miskin.

Ginting dalam Mike (2017:90) menyatakan pembangunan manusia di Indonesia adalah identik dengan pengurangan kemiskinan. Investasi di bidang pendidikan dan kesehatan akan lebih berarti bagi penduduk miskin dibandingkan penduduk tidak miskin, karena aset utama penduduk miskin adalah tenaga kasar mereka. Tersedianya fasilitas pendidikan dan kesehatan murah akan sangat

membantu untuk meningkatkan produktivitas, dan pada gilirannya meningkatkan pendapatan.

IPM merupakan indikator yang digunakan untuk perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian.



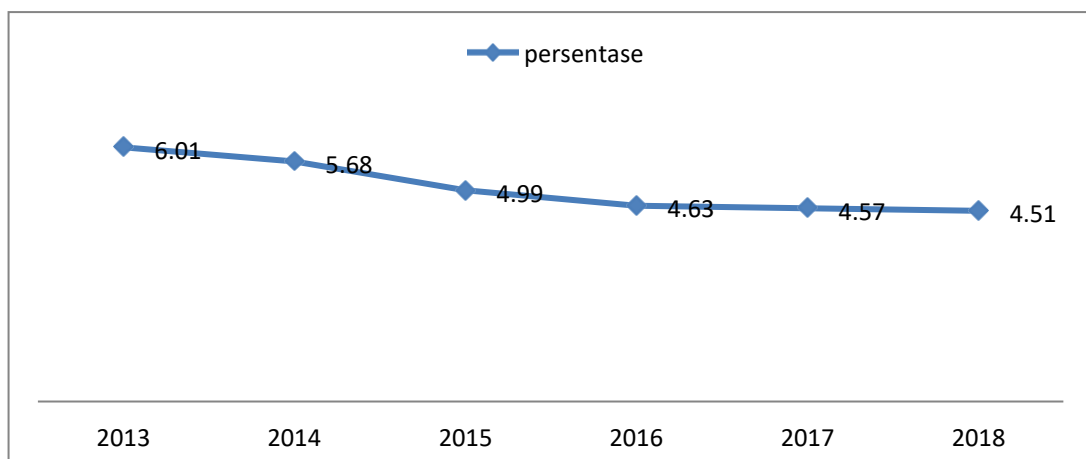
Gambar 1.3 Persentase Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

Sumber: Badan Pusat Statistik

Secara umum, pembangunan manusia Provinsi Jawa Tengah terus mengalami kemajuan selama periode 2013-2018. IPM di Provinsi Jawa Tengah meningkat dari 68,02 persen pada tahun 2013 menjadi 71,12 persen pada tahun 2018. Pada periode 2016-2017, IPM Provinsi Jawa Tengah meningkat sebesar 0,54 poin. Peningkatan pada periode tersebut lebih rendah apabila dibandingkan dengan periode 2013-2014, yang naik sebesar 0,76 poin. Meskipun selama periode 2013-2018 IPM Provinsi Jawa Tengah menunjukkan kemajuan yang besar, status pembangunan manusia Provinsi Jawa Tengah masih stagnan.

Selain faktor di atas, adapula indikator lain yang digunakan untuk mengukur jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah yaitu seberapa besar tingkat pengangguran yang ada di Provinsi Jawa Tengah tersebut. Pengangguran bisa disebabkan oleh bertambahnya angkatan kerja baru yang terjadi tiap tahunnya, sementara itu penyerapan tenaga kerja tidak bertambah. Adanya industri yang bangkrut sehingga harus merumahkan tenaga kerjanya, selain itu skill dari sumber daya manusia itu sendiri merupakan penyebab pengangguran terjadi.

Tenaga kerja yang memiliki skill rendah akan sulit bersaing dengan tenaga kerja yang memiliki skill bagus. Ketika perusahaan memiliki syarat saat seleksi penerimaan yaitu dengan adanya kualitas dari tenaga kerja. Maka hal tersebut akan membebani bagi para tenaga kerja yang memiliki skill rendah dan menimbulkan pengangguran. Tidak hanya itu, penyebab lainnya yaitu kecilnya lapangan kerja sehingga para pencari kerja akan kesulitan mencari pekerjaan. Hal ini berarti, semakin tinggi tingkat pengangguran maka akan meningkatkan jumlah penduduk miskin.



Gambar 1.4 Persentase Tingkat Pengangguran Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

Sumber: Badan Pusat Statistik

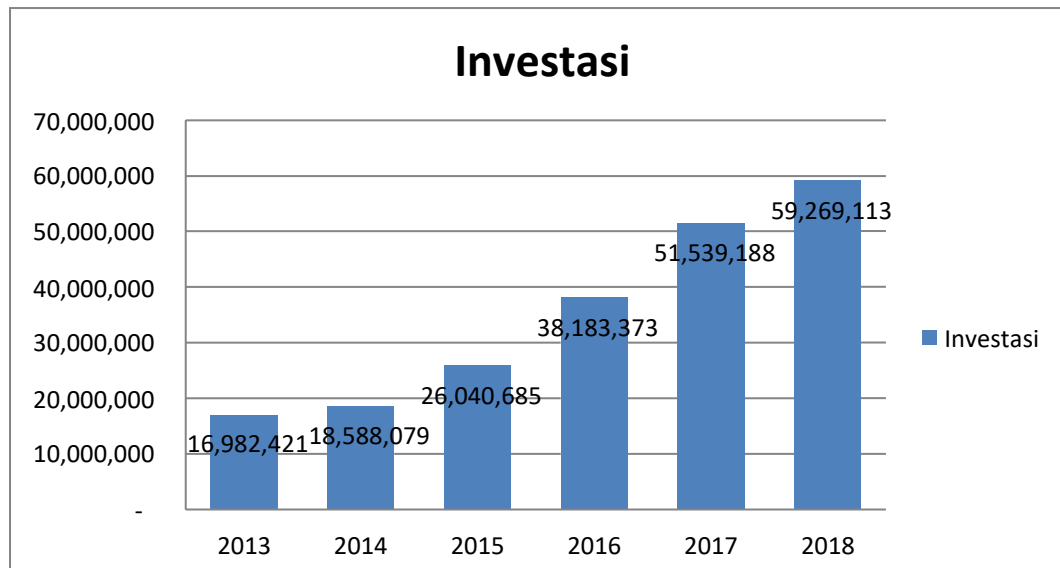
Terlihat bahwa persentase tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018 mengalami penurunan. Pada tahun 2013 terlihat bahwa tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Tengah sebesar 6,01 persen dan pada tahun 2018 mengalami penurunan tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Tengah menjadi 4,51 persen.

Secara umum tingkat pengangguran menurun dan jumlah penduduk miskin juga menurun, namun penurunan jumlah penduduk miskin lebih kecil dibandingkan dengan penurunan tingkat pengangguran, hal ini menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja belum dapat mengentaskan kemiskinan di Jawa Tengah.

Investasi merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Investasi bersumber dari investasi asing dan domestik. Investasi yang terjadi di daerah terdiri dari investasi pemerintah dan investasi swasta yang dapat berasal dari investasi pemerintah dan investasi swasta. Investasi dari sektor swasta dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri (asing). Investasi pemerintah dilakukan guna menyediakan barang publik. Investasi swasta baik dari dalam negeri maupun luar negeri dapat menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga pendapatan masyarakat akan meningkat dan jumlah penduduk miskin akan berkurang.

Secara umum realisasi investasi yang di dapat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 realisasi investasi Provinsi Jawa Tengah mencapai 16.982.421 juta rupiah. Tahun 2018 realisasi investasi Provinsi Jawa Tengah meningkat secara signifikan menjadi 59.269.113 juta rupiah. Meskipun secara umum realisasi investasi Jawa Tengah mengalami kenaikan,

namun pengaruhnya belum terlalu besar dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Jawa Tengah.



Gambar 1.5 Investasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

Sumber: Badan Pusat Statistik

Menyadari salah satu realitas pembangunan adalah terciptanya kesenjangan pembangunan antar daerah dan antar kawasan, maka pemerintah mencoba untuk melakukan perubahan konsep pembangunan dari pendekatan sektoral ke pendekatan regional. Pendekatan pengembangan wilayah tersebut, dilakukan melalui penataan ruang sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang bertujuan mengembangkan pola dan struktur ruang nasional melalui pendekatan kawasan dan diimplementasikan melalui penetapan kawasan adalah (Witoelar dalam Amin, 2009:118).

Kawasan andalan merupakan kawasan yang ditetapkan sebagai penggerak perekonomian wilayah (*prime mover*) yang memiliki kriteria sebagai kawasan yang

lebih cepat tumbuh dibandingkan daerah lainnya dalam suatu propinsi, memiliki sektor unggulan, dan memiliki keterkaitan ekonomi dengan daerah sekitar (*hinterland*). Pertumbuhan kawasan andalan diharapkan dapat memberikan imbas positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah sekitar melalui pemberdayaan sektor-sektor unggulan sebagai penggerak perekonomian daerah dan keterkaitan ekonomi antardaerah. Penekanan pada pertumbuhan ekonomi sebagai arah kebijakan penetapan kawasan andalan adalah mengingat pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu variabel ekonomi yang menjadi indikator kunci dalam pembangunan (Kuncoro, 2017:58).

Penentuan kawasan andalan dan bukan andalan sangat berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini juga bisa dikatakan bila suatu wilayah termasuk dalam kawasan andalan berarti tingkat kemiskinan di wilayah tersebut rendah dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di wilayah kawasan bukan andalan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk membahas mengenai jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah dan menelitinya dengan judul “Determinan Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di uraikan di atas permasalahannya dapat di identifikasi sebagai berikut:

1. Rata-rata persentase tingkat kemiskinan dari tahun 2013-2018 masih terbilang tinggi yaitu sebesar 12,99 persen. Tergolong *hard core* (>10 persen) yang mengindikasikan kebijakan pengentasan kemiskinan yang

dijalankan pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih belum berjalan dengan optimal.

2. Tahun 2013-2018 laju pertumbuhan ekonomi mengalami fluktuasi yaitu pada tahun 2013 sebesar 5,11 persen, tahun 2014 sebesar 5,27 persen, tahun 2015 sebesar 5,47 persen, tahun 2016 sebesar 5,25 persen, tahun 2017 sebesar 5,26 persen dan tahun 2018 sebesar 5,31 persen. Secara dari tahun 2013-2018 tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan, seharusnya semakin turun tingkat kemiskinan semakin tinggi laju pertumbuhan ekonominya.
3. Provinsi Jawa Tengah mempunyai IPM yang terus meningkat dari 68,02 persen pada tahun 2013 menjadi 71,12 persen pada tahun 2018. IPM Provinsi Jawa Tengah menunjukkan kemajuan yang besar, namun status tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah masih tergolong *hard core* (>10 persen).
4. Tahun 2013 terlihat bahwa tingkat pengangguran sebesar 6,01 persen dan pada tahun 2018 mengalami penurunan tingkat pengangguran menjadi 4,51 persen. Secara umum jumlah pengangguran menurun dan jumlah penduduk miskin juga menurun, namun penurunan jumlah penduduk miskin lebih kecil dibandingkan dengan penurunan jumlah tingkat pengangguran, hal ini menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja belum dapat mengentaskan kemiskinan di Jawa Tengah.
5. Jawa Tengah Tahun 2013-2018 mengalami peningkatan investasi. Pada tahun 2013 realisasi investasi Provinsi Jawa Tengah mencapai 16.982.421

juta rupiah. Tahun 2018 realisasi investasi Provinsi Jawa Tengah meningkat secara signifikan menjadi 59.269.113 juta rupiah. Meskipun secara umum realisasi investasi Jawa Tengah mengalami kenaikan, namun pengaruhnya belum terlalu besar dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Jawa Tengah.

1.3 Cakupan Masalah

Cakupan masalah dalam penelitian ini adalah berdasarkan latar belakang diatas, menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi mengalami fluktuasi, Secara dari tahun 2013-2018 tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan, seharusnya semakin turun tingkat kemiskinan semakin tinggi laju pertumbuhan ekonominya. Permasalahan strategis di pemerintahan Provinsi Jawa Tengah tidak jauh berbeda dengan di pemerintahan pusat (problem nasional), yakni masih tingginya angka kemiskinan jika di bandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa.

Pembangunan jalan (tol) Trans Jawa salah satunya yang menjadikan pemerataan ekonomi di Jawa Tengah kurang merata sehingga angka kemiskinan masih tinggi, banyak UKM yang tutup di beberapa kabupaten di Jawa tengah karena adanya jalan (tol), sehingga mengurangi pendapatan masyarakat sekitar.

Kemiskinan digambarkan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok. IPM merupakan indikator yang digunakan untuk perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian. IPM Provinsi Jawa Tengah menunjukkan kemajuan yang besar, namun status tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah masih tergolong *hard*

core (>10 persen). Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ukuran dan indikasi penting untuk menilai keberhasilan dari pembangunan ekonomi suatu daerah ditinjau dari sisi ekonominya. Namun demikian tingginya PDRB tidak menjamin bahwa seluruh penduduk disuatu wilayah telah menikmati kemakmuran. Investasi merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Meskipun secara umum realisasi investasi Jawa Tengah mengalami kenaikan, namun pengaruhnya belum terlalu besar dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Jawa Tengah.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar cakupan masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 ?
2. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 ?
3. Bagaimana pengaruh Jumlah Pengangguran terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 ?
4. Bagaimana pengaruh Investasi terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 ?
5. Bagaimana pengaruh Kawasan andalan dan bukan andalan terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018.
2. Menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018.
3. Menganalisis pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018.
4. Menganalisis pengaruh Investasi terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018.
5. Menganalisis pengaruh Kawasan andalan dan bukan andalan terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat teoritis
Untuk menambah khasanah pustaka yang berkaitan dengan determinan kemiskinan di Provinsi Jawa tengah.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Lembaga Pemerintah

Sebagai masukan yang membangun mengenai Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Pengangguran, Investasi dan Dummy Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018.

b. Bagi Peneliti Berikutnya

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta referensi terhadap penelitian yang sejenis.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA TEORITIS, KERANGKA BERFIKIR DAN HIPOTESIS PENELITIAN

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian ini yaitu menjelaskan hasil penelitian terdahulu sehingga menghasilkan kebaruan penelitian. Dalam penelitian ini ada empat variabel yang mempengaruhi tingkat kemiskinan yaitu variabel indeks pembangunan manusia, produk domestik regional bruto, tingkat pengangguran, investasi dan dummy. Berbagai riset telah dilakukan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan. Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan adalah indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia merupakan salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk menilai kualitas pembangunan manusia, baik dari sisi dampaknya terhadap kondisi fisik manusia (kesehatan dan kesejahteraan) maupun yang bersifat non fisik (intelektualitas). Penelitian Muhammad (2010:364) variabel yang mempunyai pengaruh paling dominan terhadap besarnya kemiskinan adalah IPM. Pada penelitian ini variabel PDRB memiliki signifikansi pengaruh terhadap kemiskinan hanya pada α 20%, hal ini sesuai temuan dari world bank (2006) bahwa pertumbuhan ekonomi belum dapat secara signifikan mengurangi kemiskinan dikarenakan pola dari pertumbuhan ekonomi di Indonesia yaitu terjadinya ketimpangan. Sejak tahun 1998, pertumbuhan bukan saja berjalan dengan tingkat yang lebih rendah, tetapi juga menjadi semakin kurang merata, sehingga jumlah

penduduk miskin tidak akan dapat dikurangi secara signifikan tanpa adanya pertumbuhan ekonomi yang bermanfaat bagi orang miskin.

Penelitian tentang faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan juga dilakukan oleh Susy (2013:340). Hasil penelitian menunjukkan PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan sedangkan secara teori semestinya pengaruh ini bersifat negatif. Pengangguran berdasarkan hasil penelitian berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, dengan hasil tersebut diharapkan Pemerintah dapat mencari pendekatan yang terbaik dalam menekan angka pengangguran sehingga dampaknya dapat menurunkan tingkat Pengangguran. IPM berdasarkan hasil penelitian berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, dengan hasil tersebut diharapkan Pemerintah untuk bisa lebih baik dalam mengentaskan kemiskinan dengan membuat program-program bagi masyarakat yang bisa meningkatkan IPM.

Penelitian Myanti (2013:347) hasil uji t menunjukkan bahwa laju pertumbuhan PDRB secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Bali. Dari hasil regresi ditemukan bahwa produk domestik regional bruto (PDRB) yang di ukur dengan laju pertumbuhan laju pertumbuhan PDRB memberikan pengaruh yang negatif dan tidak signifikan. Tingkat pengangguran terbuka secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Bali. Hasil regresi yang menunjukkan bahwa pengangguran yang di ukur dengan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Bali.

Penelitian yang dilakukan oleh Destiana (2012:3) menunjukkan bahwa dari hasil regresi tersebut terbukti bahwa probabilitas Fhitung (0.000399) yang artinya secara bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap kemiskinan Kabupaten Bondowoso. Nilai thitung PDRB (X1) sebesar -2.315457 dengan probabilitas 0.0391. maka probabilitas thitung $< \alpha = 5\%$ yang berarti signifikan. Artinya variabel PDRB signifikan berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Bondowoso. Sedangkan Nilai thitung Angka Buta Huruf (X2) sebesar -0.403255 dengan tingkat probabilitas 0.6939. maka probabilitas thitung $> \alpha = 5\%$ yang berarti tidak signifikan. Terhadap kemiskinan di Kabupaten Bondowoso. Dari penelitaian ini diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 0.683506. artinya 68,3% variabel kemiskinan di kabupaten Bondowoso dipengaruhi oleh variabel PDRB dan pendidikan (ABH). Sedangkan sisanya 31,7% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar variabel lain PDRB dan Angka Buta Huruf.

Rusdarti (2013:132) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah artinya pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Pengangguran tidak signifikan secara statistik terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah, artinya indikator kemiskinan yang terjadi bukan disebabkan oleh tingkat pengangguran melainkan oleh indikator lain. Sementara itu belanja berpengaruh signifikan secara statistik terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah artinya hasil temuan ini menunjukkan masih dominannya belanja operasional pemerintah dengan orientasi belanja pegawai yang semakin tinggi menyebabkan rendahnya prioritas pada pelayanan publik. Perbedaan kota

dengan kabupaten berpengaruh signifikan tingkat kemiskinan di Provinsi JawaTengah.

Yayuk (2014:46) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa variabel PDRB memiliki nilai t-hitung sebesar -6,316 atau lebih besar dibandingkan dengan nilai t-tabel sebesar -2,306 pada α sebesar 5 persen. Hal ini berarti bahwa secara individual variabel PDRB berpengaruh nyata terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Nagan Raya. Koefisien regresi untuk variabel PDRB sebesar -1,199, hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan nilai PDRB 1 persen maka tingkat kemiskinan di Kabupaten Nagan Raya menurun sebesar 1,199 persen. Selanjutnya untuk variabel jumlah penduduk diperoleh nilai t-hitung sebesar -2,073 atau lebih besar dibandingkan dengan nilai t-tabel sebesar -1,860, pada α sebesar 10 persen. Hal ini bermakna bahwa secara individu variabel jumlah penduduk berpengaruh nyata terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Nagan Raya. Variabel jumlah penduduk memiliki koefisien sebesar -0,478 yang berarti bahwa setiap kenaikan jumlah penduduk 1 persen maka tingkat kemiskinan di Kabupaten Nagan Raya menurun menjadi 0,478 persen. Untuk menentukan apakah secara bersama-sama variabel PDRB dan jumlah penduduk mempengaruhi tingkat kemiskinan di Nagan Raya, studi ini juga menampilkan hasil Uji Simultan (F). Sebagaimana disajikan pada Tabel 6, nilai F-hitung sebesar 50,399 atau lebih tinggi dibandingkan dengan nilai F-tabel yang hanya sebesar 5,317. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kedua variabel bebas yang dimasukkan dalam model ini yakni PDRB dan jumlah penduduk secara bersama-sama (serempak) berpengaruh nyata terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Nagan Raya.

I Made Tony Wirawan (2015:558) dalam penelitiannya nilai thitung (-2,330) lebih kecil dari -ttabel (-1,671). Jadi H_0 ditolak, yang artinya pendidikan secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin Provinsi Bali 2007-2013. Nilai $\beta_1 = -1064,817$ memiliki arti bahwa apabila pendidikan naik 1 tahun, maka akan mengakibatkan penurunan jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali 2007-2013 sebesar 1064,817 jiwa. Nilai thitung (-7,388) lebih kecil dari -ttabel (-1,671). Jadi H_0 ditolak, yang artinya PDRB per kapita secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin Provinsi Bali 2007-2013. Nilai $\beta_1 = -0,003$ memiliki arti bahwa apabila PDRB per kapita naik Rp.1,- maka akan mengakibatkan penurunan jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali 2007-2013 sebesar 0,003 jiwa. Nilai thitung (3,141) lebih besar dari ttabel (1,671). Jadi H_0 ditolak, yang artinya tingkat pengangguran secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin Provinsi Bali 2007-2013. Nilai $\beta_1 = 1627,066$ memiliki arti bahwa apabila tingkat pengangguran naik 1 persen, maka akan mengakibatkan kenaikan jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali 2007-2013 sebesar 1627,066 jiwa.

Ni Komang Meriyanti (2015:60) Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa program IPM berada pada kategori sangat baik sedangkan pengentasan kemiskinan berada pada kategori baik. Koefisien korelasi yang diperoleh sebesar 0,594 memiliki pengaruh positif dan signifikan. Hal ini menunjukkan keeratan hubungan antara program IPM terhadap pengentasan kemiskinan tergolong sedang. Sumbangan program IPM terhadap pengentasan

kemiskinan sebesar 35,2% sedangkan sisanya sebesar 64,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

Fima (2015:48) Hasil menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah. Satu dari berbagai faktor yang mengakibatkan rendahnya tingkat kehidupan penduduk di Provinsi Sulawesi Tengah adalah kurangnya penggunaan tenaga kerja secara efisien. Penduduk yang memiliki pekerjaan terkadang tidak sesuai dengan tingkat keahlian yang dimiliki, sehingga hasil yang diperoleh tidak optimal. Variabel PDB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Kemiskinan yang terjadi di Indonesia akan semakin rendah jika terjadi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan PDB semakin tinggi, maka penurunan kemiskinan semakin cepat. Penurunan kemiskinan hampir selalu diikuti peningkatan pendapatan rata-rata perkapita atau standar kehidupan, dan sebaliknya kemiskinan bertambah jika PDB menurun.

Nurul (2016:23) variabel pendapatan perkapita secara parsial berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah. Variabel pendapatan perkapita memiliki pengaruh negatif yaitu sebesar 0,3267 artinya bahwa setiap kenaikan pendapatan perkapita sebesar satu persen akan menurunkan jumlah penduduk miskin sebesar 0,3267persen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pendapatan perkapita menunjukkan tanda negatif dan berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah. Variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah. Variabel TPT

memiliki pengaruh positif yaitu sebesar 0,006 artinya bahwa setiap kenaikan TPT sebesar satu persen akan menurunkan jumlah penduduk miskin sebesar 0,006 persen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel tingkat pengangguran terbuka menunjukkan tanda positif dan berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah. Variabel IPM secara parsial berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah. Variabel IPM memiliki pengaruh negatif yaitu sebesar 0,0498 artinya bahwa setiap kenaikan IPM sebesar satu persen akan menurunkan jumlah penduduk miskin sebesar 0,0498 persen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel IPM menunjukkan tanda negatif dan berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah. Variabel pertumbuhan penduduk memiliki pengaruh negatif yaitu sebesar 0,0009 artinya bahwa setiap kenaikan pertumbuhan penduduk sebesar satu persen akan menurunkan jumlah penduduk miskin sebesar 0,0009 persen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pertumbuhan penduduk menunjukkan tanda negatif dan berpengaruh tidak signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah.

I Made Parwata (2016:8) dalam penelitiannya menunjukkan ada pengaruh dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan dengan sumbangan pengaruh sebesar 64,6%, (2) ada pengaruh negatif dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap tingkat kemiskinan dengan sumbangan pengaruh sebesar 47,3%, (3) ada pengaruh positif dari tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan dengan sumbangan pengaruh sebesar 7,4%, dan (4) ada pengaruh negatif dari Produk

Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap tingkat pengangguran terbuka dengan sumbangan pengaruh sebesar 7,0%.

Lavenia (2016:932) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa belanja modal mempunyai nilai koefisien sebesar 1.057303 yang berarti bahwa belanja modal mempunyai pengaruh positif terhadap kemiskinan. Artinya apabila belanja modal naik sebesar 1% maka kemiskinan akan naik sebesar 0.01057% *ceteris paribus*. Pengaruh tersebut tidak sesuai dengan teori namun signifikan secara statistik pada tingkat. Hal ini disebabkan karena masih ada program-program pemerintah yang dianggap masih belum tepat sasaran dan bahkan belum berhasil dalam menuntaskan kemiskinan. Hal ini disebabkan program tersebut belum menyentuh masalah mendasar yang terjadi pada masyarakat sehingga hasilnya belum efektif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mempunyai nilai koefisien sebesar -1.433856 yang berarti bahwa Indeks Pembangunan Manusia mempunyai pengaruh negatif terhadap kemiskinan. Artinya apabila indeks pembangunan manusia naik sebesar 1% maka tingkat kemiskinan akan turun sebesar 0.01433% *ceteris paribus*. Pengaruh tersebut sesuai dengan teori dan signifikan secara statistic. Secara teori apabila indeks pembangunan manusia meningkat kemiskinan akan turun.

Waseso (2016:33) menunjukkan bahwa koefisien regresi PDRB (X1) bertanda positif 0.203. Hal ini menyatakan bahwa setiap penambahan 1 persen PDRB, maka kemiskinan akan mengalami Kenaikan sebesar 0.203. Nilai signifikan PDRB sebesar $0.170 > 0,05$ H_0 diterima, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel PDRB (X1)

terhadap kemiskinan (Y). Koefisien regresi Inflasi (X2) bertanda negative 0.007. Hal ini menyatakan bahwa setiap penambahan 1 persen Inflasi maka kemiskinan akan mengalami Penurunan sebesar 0.007. Berdasarkan hasil hipotesis diperoleh nilai T Inflasi negatif 0,031 dengan signifikan 0,975 lebih besar daripada 0,05. Artinya bahwa Inflasi berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Koefisien regresi IPM (X3) bertanda negatif 1.634. Hal ini menyatakan bahwa setiap penambahan 1 persen IPM, maka kemiskinan akan mengalami penurunan sebesar 1.634. Berdasarkan hasil hipotesis T IPM negatif 8,814 dengan signifikan 0,000 kurang dari 0,05. Artinya bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Koefisien regresi Pengangguran (X4) bertanda Positif 0.455. Hal ini menyatakan bahwa setiap penambahan 1 persen pengangguran, maka kemiskinan akan mengalami Kenaikan sebesar 0.455. Berdasarkan hasil hipotesis T Pengangguran Positif 2,152 dengan signifikan 0,033 kurang dari 0,05. Artinya bahwa pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Penelitian yang dilakukan oleh Feby (2016:552) menunjukkan variabel (Pengangguran Terbuka) memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan di Aceh dengan koefisien variabel (Pengangguran Terbuka) sebesar - 0,23473E-04. Variabel IPM (Indeks Pembangunan Manusia) berpengaruh signifikan secara positif terhadap kemiskinan di Aceh. dengan koefisien variabel IPM sebesar -60,585.

Reggi Irfan (2016:4) dalam penelitiannya mengenai faktor tingkat kemiskinan dijelaskan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dengan nilai koefisien negatif sebesar $-85663,36$ dan nilai probabilitas sebesar $0,0075$, yang artinya pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Apabila koefisien pertumbuhan ekonomi (PE) meningkat sebesar satu satuan, tingkat kemiskinan menurun sebesar $-85663,36$ persen di Jawa Timur pada tahun 2005- 2014. Berdasarkan hasil analisis dapat dijelaskan bahwa variabel upah minimum berpengaruh negatif dengan koefisien negative sebesar $-2,023604$ dan dengan nilai probabilitas sebesar $0,0049$, yang artinya variabel upah minimum regional berpengaruh negatif dan signifikan. Hal ini menunjukkan jika upah minimum regional meningkat sebesar satu satuan, maka tingkat kemiskinan akan berkurang sebesar $-2,023604$ persen di Jawa Timur tahun 2005-2014. Berdasarkan hasil analisis dapat dijelaskan bahwa variabel tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dengan nilai koefisien sebesar $427587,0$ dan dengan nilai probabilitas sebesar $0,0004$. Yang artinya variabel tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan. Hal ini menunjukkan dengan nilai koefisien positif sebesar $427587,0$,mengindikasikan bahwa setiap perubahan persentase sebesar satu satuan variabel pengangguran akan memberikan pengaruh terhadap Kemiskinan dengan koefisien sebesar $427587,0$ persen.

Ahmad Fathul (2016:5) dalam penelitiannya dapat dijelaskan bahwa variabel upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan dengan nilai koefisien negatif sebesar $0,0000914$ terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa

Timur tahun 2006-2013. Hal ini menunjukkan bahwa upah minimum mempunyai pengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur meskipun memiliki hubungan yang negatif. Hasil ini sesuai dengan hipotesis penelitian yang menyatakan ada pengaruh negatif dan signifikan upah minimum kabupaten/kota terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur selama tahun 2006-2013. Berdasarkan hasil analisis dapat dijelaskan bahwa variabel indeks pembangunan manusia berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai koefisien positif sebesar 0,008284 terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur tahun 2006-2013. Hal ini menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia tidak mempunyai pengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur meskipun memiliki hubungan yang positif. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis penelitian yang menyatakan ada pengaruh negatif dan signifikan indeks pembangunan manusia terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur selama tahun 2006-2013. Berdasarkan hasil analisis dapat dijelaskan bahwa variabel pengangguran berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai koefisien positif sebesar 0,641247 terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur tahun 2006-2013. Hasil ini sesuai dengan hipotesis penelitian yang menyatakan ada pengaruh positif dan signifikan pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur selama tahun 2006-2013.

Tannia Octasari (2016:501) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Dengan $(P > [z]) < (0,05)$ dan nilai koefisien regresi parsial sebesar 0,2920801, itu artinya setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi atau PDRB

sebesar 1 milyar, maka akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,29% sebaliknya jika pertumbuhan ekonomi atau PDRB turun, maka akan menambah jumlah penduduk miskin. Semakin tinggi tingkat PDRB suatu wilayah, maka akan semakin mengurangi pula jumlah penduduk miskin di Indonesia. Peningkatan PDRB diikuti oleh penambahan jumlah dan kualitas faktor-faktor produksi termasuk juga masyarakat sehingga mendorong pula perbaikan dan peningkatan kesejahteraan. Pertumbuhan ekonomi atau PDRB dari masing-masing provinsi di Indonesia yang tinggi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Dengan $(P > [z]) < (0,05)$ dan nilai koefisien regresi parsial sebesar -0,1851833, upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia. Penetapan upah minimum yang tidak hanya diterapkan pada lapangan kerja formal namun juga informal mampu meningkatkan kesejahteraan para pekerja dan jika disertai peningkatan upah minimum secara terus menerus akan mampu mengurangi jumlah penduduk miskin secara signifikan. Tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia Dengan $(P > [z]) < (0,05)$ dan nilai koefisien regresi parsial sebesar 0,0943501, itu artinya setiap kenaikan tingkat pengangguran sebesar 1%, maka akan diikuti kenaikan kemiskinan sebesar 0,09% sebaliknya jika tingkat pengangguran turun, maka akan diikuti pengurangan kemiskinan. Salah satu penyebab masih tingginya tingkat pengangguran di Indonesia adalah keterbatasan pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja sektor formal sehingga menyebabkan tenaga kerja banyak bekerja di sektor informal.

Himawan (2016:559) dalam penelitiannya dapat disimpulkan "Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan". Hal ini berarti variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat menerangkan variabel tidak bebas yaitu tingkat kemiskinan. Untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam mengelola Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang lebih baik, perlu ditingkatkan secara berkesinambungan sehingga tingkat kemiskinan menurun pada setiap tahun.

Alhudori (2017:123) dalam penelitiannya menunjukkan analisis regresi linear berganda IPM mempunyai hubungan positif terhadap jumlah penduduk miskin dimana jika IPM naik 1 persen maka jumlah penduduk miskin akan naik sebesar 0,358. Berdasarkan analisis regresi linear berganda PDRB mempunyai hubungan negatif terhadap jumlah penduduk miskin, dimana jika PDRB naik 1 persen maka jumlah penduduk miskin akan turun sebesar -0,006. Berdasarkan analisis regresi linear berganda jumlah pengangguran mempunyai hubungan positif terhadap jumlah penduduk miskin dimana jika jumlah pengangguran naik 1 persen maka jumlah penduduk miskin akan naik sebesar 0,010.

Penelitian yang dilakukan oleh Mike Ardila (2017:101) menunjukkan bahwa nilai probabilitas t-statistik variabel IPM sebesar 0,033 lebih kecil dari 0,05 ($0,033 < 0,05$) artinya H_0 ditolak H_1 diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel IPM berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Nilai probabilitas t-statistik variabel laju pertumbuhan PDRB sebesar 0,210 lebih besar dari 0,05 ($0,210 > 0,05$), artinya H_0 diterima dan H_1 ditolak. Maka dapat

disimpulkan bahwa variabel PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Amali (2017:99) menunjukkan bahwa berdasarkan uji statistik parsial dengan tingkat keyakinan $\alpha=5\%$, diperoleh nilai t-statistik untuk variabel PER (β_1) yang nilainya lebih besar dari t-probabilitas ($-2,267347 > 0,0288$), artinya H_0 ditolak H_1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi (PER) selama periode 2010-2013 berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Untuk nilai t-statistik untuk variabel indeks pembangunan manusia IPM (β_2) diperoleh nilai yang lebih besar dari t-probabilitas ($1,490156 < 0,1440$), artinya H_0 diterima H_1 ditolak. Ini menunjukkan bahwa IPM berpengaruh tidak signifikan terhadap perkembangan atau peningkatan kemiskinan.

Hastina (2017:170) Dari hasil regresi, nilai koefisien untuk variabel pendapatan perkapita adalah -0.148570 dimana variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t hitung = -3.653255 dan nilai probability sebesar 0.0038 (di bawah $\alpha = 5\%$ atau 0.05). Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara pendapatan perkapita dengan kemiskinan adalah negatif dan signifikan. Sehingga dapat dikatakan bahwa jika nilai pendapatan perkapita mengalami kenaikan maka kemiskinan akan mengalami penurunan Oleh sebab itu variabel pendapatan perkapita terbukti berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, maka hipotesis (H_1) diterima. Dari hasil regresi, nilai koefisien untuk variabel Investasi adalah $-0,041825$ dimana variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan

terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t hitung = -1.972963 dan nilai probability sebesar 0.0742 (di atas $\alpha = 5\%$ atau 0.05). Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara investasi dengan kemiskinan adalah negatif dan tidak signifikan. Sehingga dapat dikatakan bahwa jika nilai Investasi mengalami kenaikan maka kemiskinan akan mengalami penurunan. Oleh sebab itu variabel investasi tidak terbukti berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara, maka hipotesis (H2) ditolak. Dari hasil regresi, nilai koefisien untuk variabel tingkat inflasi adalah 0.028127 dimana variabel tersebut berpengaruh tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t hitung = 1,071103 dan nilai probability sebesar 0.3071 (di atas $\alpha = 5\%$ atau 0.05). Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara inflasi dengan kemiskinan adalah positif dan tidak signifikan. Sehingga dapat dikatakan bahwa jika tingkat inflasi naik maka kemiskinan akan mengalami kenaikan. Oleh sebab itu variabel inflasi terbukti berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara maka hipotesis (H3) ditolak.

Uray (2017:819) Dengan hasil t hitung 3,181 > t tabel 1,746 menunjukkan bahwa semakin tinggi PDRB maka tingkat kemiskinan tidak berkurang secara signifikan. Pendidikan berpengaruh negatif sangat nyata terhadap tingkat kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Sambas. Dengan nilai t hitung (-1.343) < t tabel maka pendidikan mempengaruhi kemiskinan di Kabupaten Sambas. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka akan semakin rendah kemiskinan yang terjadi. Pengangguran juga mempengaruhi kemiskinan yang ada di Kabupaten

Sambas. Dengan t hitung $1,634 < t$ tabel maka semakin tinggi pengangguran maka semakin tinggi pula kemiskinan yang terjadi dan sebaliknya semakin rendah pengangguran maka semakin rendah pula kemiskinan.

Rudi (2017:57) dalam penelitiannya menunjukkan hasil uji t untuk variabel PDRB (X1) diperoleh nilai t hitung dari variable PDRB sebesar $-2,845$ dengan nilai Probabilitas sebesar $0,0254$. Dengan menggunakan tingkat signifikansi $0,05\%$ uji satu sisi dan nilai dk (derajat kebebasan) sebesar $n-2$ ($9-2$) = 7 diperoleh nilai t tabel sebesar $1,894$. Karena t hitung = $-2,845 > t$ tabel $1,894$ maka H_0 ditolak, artinya PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penduduk miskin di Kabupaten Sumbawa Barat selama tahun 2008-2016. Untuk variabel pengangguran (X2) diperoleh nilai t hitung dari variabel pengangguran sebesar $2,761$ dengan nilai Probabilitas sebesar $0,0275$. Dengan menggunakan tingkat signifikansi $0,05\%$ uji satu sisi dan nilai dk (derajat kebebasan) sebesar $n-2$ ($9-2$) = 7 diperoleh nilai t tabel sebesar $1,984$. Karena t hitung = $2,761 > t$ tabel $1,984$ maka H_0 ditolak, artinya pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penduduk miskin di Kabupaten Sumbawa Barat selama tahun 2008-2016. Hasil uji f diperoleh nilai f hitung sebesar $8,013399$ dengan nilai Probabilitas sebesar $0,0424$. Dengan menggunakan tingkat signifikansi $0,05\%$ uji satu sisi dan nilai dk (derajat kebebasan) sebesar $n-kk-1$ ($9-2$) ($2-1$) = (7) (1) diperoleh nilai F tabel sebesar $5,59$. Karena F hitung = $8,013 > F$ tabel $5,59$ maka H_0 ditolak, artinya PDRB dan pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penduduk miskin di Kabupaten Sumbawa Barat selama tahun 2008-2016. Nilai koefisien determinasi (R^2) diperoleh nilai koefisien determinasi,

sebesar 0.625627. Nilai koefisien determinasi ini, memberi arti bahwa variabel PDRB dan pengangguran mampu menjelaskan perubahan atau mempengaruhi penduduk miskin sebesar 63%.

Penelitian yang dilakukan oleh Yunie (2018:173) menunjukkan slope koefisien dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan angka -0,09 yang berarti bahwa kenaikan 1 persen angka Indeks Pembangunan Manusia akan menurunkan jumlah penduduk miskin sebesar 0,09 persen. Pada persamaan tersebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM) hubungannya negatif dan signifikan pada $\alpha = 5\%$. Hasil regresi persamaan menunjukkan slope koefisien dari PDRB per kapita menunjukkan angka -0.413 yang berarti bahwa kenaikan 1 persen angka PDRB per kapita akan menurunkan jumlah penduduk miskin sebesar 0.413 persen. Pada persamaan tersebut PDRB per kapita hubungannya negatif dan signifikan pada $\alpha = 5\%$. Hasil regresi persamaan menunjukkan slope koefisien dari *Unemployment*/ atau jumlah pengangguran (U) menunjukkan angka 0 yang berarti bahwa kenaikan 1 persen angka Jumlah Pengangguran akan meningkatkan jumlah penduduk miskin sebesar 2,75 persen. Pada persamaan tersebut *Unemployment* atau jumlah pengangguran (U) hubungannya positif dan signifikan pada $\alpha = 5\%$.

2.2 Kerangka Teoritis

2.2.1 Kemiskinan

2.2.1.1 Definisi Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dipunyai seperti makanan, pakaian, tempat berlindung dan air minum, hal-

hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup. Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan kehormatan yang layak sebagai warga negara.

Menurut Amartya Sen dalam Bloom dan Canning, bahwa seseorang dikatakan miskin bila mengalami "*capability deprivation*" dimana seseorang tersebut mengalami kekurangan kebebasan yang substantif. Menurut Bloom dan Canning, kebebasan membutuhkan pendidikan dan keamanan membutuhkan kesehatan (Wijayanto, 2014:73).

Pengertian kemiskinan dalam arti luas keterbatasan yang dipandang oleh seseorang, sebuah keluarga, sebuah komunitas, atau bahkan sebuah negara yang menyebabkan ketidaknyamanan dalam kehidupan, terancamnya penegakan hak dan keadilan, terancamnya posisi tawar (*bargaining*) dalam pergaulan dunia, hilangnya generasi, serta suramnya masa depan bangsa dan negara. Negara-negara maju yang lebih menekankan pada "kualitas hidup" yang dinyatakan dengan perubahan lingkungan hidup melihat bahwa laju pertumbuhan industri tidak mengurangi bahkan justru menambah tingkat polusi udara dan air, mempercepat penyusutan sumber daya alam, dan mengurangi kualitas lingkungan.

Kemiskinan (*poverty*) merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh negara, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Hal ini dikarenakan kemiskinan itu bersifat multidimensional artinya karena kebutuhan manusia itu bermacam-macam, maka kemiskinan pun memiliki banyak aspek primer yang berupa miskin akan aset, organisasi sosial politik, pengetahuan, dan keterampilan serta aspek sekunder yang berupa miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber

keuangan, dan informasi. dimensi-dimensi kemiskinan tersebut termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah. Selain itu, dimensi-dimensi kemiskinan saling berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini berarti kemajuan atau kemunduran pada salah satu aspek dapat mempengaruhi kemajuan atau kemunduran aspek lainnya. Dan aspek lain dari kemiskinan ini adalah bahwa yang miskin itu menunya baik secara individual maupun kolektif.

Ukuran kemiskinan menurut Nurkse dalam Mudrajat Kuncoro (2016:113) secara sederhana dan yang umum digunakan dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

1. Kemiskinan Absolut

Seseorang termasuk golongan miskin absolut hasil pendapatannya berada di bawah kemiskinan dan tidak cukup untuk menentukan kebutuhan dasar hidupnya. Konsep ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian, dan perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup.

Kesulitan utama dalam konsep kemiskinan absolut adalah menentukan komposisi dan tingkat kebutuhan minimum karena kedua hal tersebut hanya dipengaruhi oleh adat kebiasaan saja, tetapi juga iklim, tingkat kemajuan suatu negara, dan faktor-faktor ekonomi lainnya. Walaupun demikian, untuk dapat hidup layak, seseorang membutuhkan barang-barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan fisik dan sosialnya.

2. Kemiskinan Relatif

Seseorang termasuk golongan miskin relatif apabila telah dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat sekitarnya. Berdasarkan konsep ini, garis kemiskinan akan mengalami perubahan bila tingkat hidup masyarakat berubah sehingga konsep kemiskinan ini bersifat dinamis atau akan selalu ada.

Oleh karena itu, kemiskinan dapat dari aspek ketimpangan sosial yang berarti semakin besar ketimpangan antara tingkat penghidupan golongan atas dan golongan bawah, maka akan semakin besar pula jumlah penduduk yang dapat dikategorikan selalu miskin.

3. Kemiskinan Kultural

Seseorang termasuk golongan miskin kultural apabila sikap orang atau sekelompok masyarakat tersebut tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya atau dengan kata lain seseorang tersebut miskin karena sikapnya sendiri yaitu pemalas dan tidak mau memperbaiki kondisinya.

Banyak ukuran yang menentukan angka kemiskinan, salah satunya adalah garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah suatu ukuran yang menyatakan besarnya pengeluaran (dalam rupiah) untuk menentukan kebutuhan dasar minimum makanan dan kebutuhan non makanan, atau standar yang menyatakan batas seseorang dikatakan miskin bila dipandang dari sudut konsumsi. Garis kemiskinan digunakan untuk mengetahui batas seseorang dikatakan miskin atau tidak, sehingga garis kemiskinan dapat digunakan untuk mengukur dan menentukan jumlah kemiskinan.

Menurut Rencana Kerja Pemerintah Bidang Prioritas Penanggulangan Kemiskinan (dikutip dari Wijayanto, 2014:43), penyebab kemiskinan adalah pemerataan pembangunan yang belum menyebar secara merata terutama di daerah pedesaan. Kesempatan berusaha di daerah pedesaan dan perkotaan belum dapat mendorong penciptaan pendapatan bagi masyarakat terutama bagi rumah tangga miskin.

Penyebab yang lain adalah masyarakat miskin belum mampu menjangkau pelayanan dan fasilitas dasar seperti pendidikan, kesehatan, air minum dan sanitasi, serta transportasi. Gizi buruk masih terjadi di lapisan masyarakat miskin. Hal ini disebabkan terutama oleh cakupan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin yang belum memadai. Bantuan sosial kepada masyarakat miskin, pelayanan bantuan kepada masyarakat rentan (seperti penyandang cacat, lanjut usia, dan yatim piatu), dan cakupan jaminan sosial bagi rumah tangga miskin masih jauh dari memadai.

2.2.1.2 Indikator Kemiskinan

Badan Pusat Statistik (2017) menggunakan konsep kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar (*basic need approach*) untuk mengukur kemiskinan. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Lebih jauh lagi, BPS menggunakan garis kemiskinan yang merupakan penjumlahan dari batas kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan untuk melihat kemiskinan.

Garis kemiskinan makanan adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang rill dikonsumsi penduduk yang kemudian disertakan dengan 2100 kilo kalori perkapita per hari. Garis kemiskinan bukan makanan merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi bukan makanan terpilih meliputi perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan yang diawali oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan. Oleh karena itu penduduk memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dimasukkan ke dalam kelompok penduduk miskin.

Selain ukuran kemiskinan yang dikeluarkan oleh lembaga terkait kemiskinan di dalam negeri, juga terdapat ukuran kemiskinan yang dikeluarkan oleh lembaga luar negeri. *World Bank* menggunakan ukuran yang berbeda tentang kemiskinan dengan membuat garis kemiskinan absolut sebesar US\$ 1 dan US\$ 2 PPP (*Purchasing Power Parity*/paritas daya beli) per hari (bukan nilai tukar US\$ resmi) dengan tujuan untuk membandingkan waktu untuk menilai kemajuan yang dicapai dalam memerangi kemiskinan di tingkat global/internasional. Angka konversi PPP adalah banyaknya rupiah yang dikeluarkan untuk membeli sejumlah kebutuhan barang dan jasa dimana jumlah yang sama tersebut dapat dibeli sebesar US\$ 1 di Amerika Serikat. Angka konversi ini dihitung berdasarkan harga dan kuantitas di masing-masing negara yang dikumpulkan dalam suatu survei yang biasanya dilakukan setiap lima tahun.

Todaro dalam Yudi (2015:514), mengungkapkan adanya sejumlah kriteria yang disepakati secara luas oleh para ekonomi dalam menentukan tepat atau

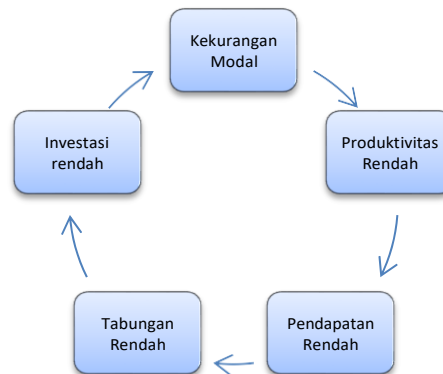
tidaknya suatu ukuran kemiskinan, yaitu prinsip anonimitas, independen penduduk, monotonitas, dan sensitivitas distribusional. Prinsip monotonitas berarti jika ada penambahan pendapatan kepada seseorang yang berada di bawah garis kemiskinan dengan semua pendapatan orang lain tetap, maka kemiskinan tidak mungkin lebih besar dari sebelumnya. Prinsip distribusional menyatakan bahwa dengan semua hal lainnya sama, jika mentransfer pendapatan kepada orang miskin kepada orang yang lebih kaya maka perekonomian seharusnya dipandang menjadi miskin.

2.2.1.2 Teori Penyebab Kemiskinan

Sharp dalam Kuncoro (2016:111) mengidentifikasi penyebab kemiskinan dari sisi ekonomi. Pertama, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya yang terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktifitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau keturunan. Ketiga, kemiskinan muncul karena perbedaan akses dalam modal. Dari ketiga penyebab kemiskinan tersebut bisa dijelaskan melalui teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*).

Nurkse dalam Kuncoro (2016:115) mengungkapkan bahwa adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menjadi

penyebab peroduktivitas rendah sehingga pendapatan yang diterima pada akhirnya juga rendah. Pendapatan yang rendah akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi, kemudian rendahnya investasi tersebut akan menyebabkan keterbelakangan. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2.1 Lingkaran Kemiskinan Versi Nurkse

Nurske menjelaskan kemiskinan merupakan keterkaitan beberapa faktor yang akan berujung pada kemiskinan. Gambar 2.1 dapat menjelaskan pendapat Nurske yang mengatakan “*a poor country is poor because it is poor*” (negara miskin itu miskin karena dia memang miskin).

Menurut Paul Spicker (*Proverty and the Welfare State:Dispelling the Myths*, A Catalyst Working Paper, London: Catalyst), dalam Wijayanto (2014:47) penyebab kemiskinan dapat dibagi kedalam empat Mazhab yang berbeda, yaitu:

- a. *Individual Explanation*, kemiskinan dalam terminology karakteristik orang miskin itu sendiri, yaitu hasil dari kemalasan, kekurangan perorangan atau beberapa macam kekurangan atau kecacatan, seorang miskin karena membuat kesalahan pilihan, memiliki anak pada waktu yang tidak tepat, gagal untuk bekerja dan sebagian.

- b. *Familial Explanation*, kemiskinan yang diakibatkan oleh faktor keturunan, dimana terdapat warisan pada generasi selanjutnya sehingga terjadi ketidakberuntungan yang berulang terus ke generasi selanjutnya, baik dalam warisan asuhan dan pendidikan.
- c. *Subcultural Explanation*, kemiskinan karena pola perilaku, tapi lebih disebabkan oleh keadaan pada pilihan personal.
- d. *Structural Explanation*, mengidentifikasi kemiskinan sebagai hasil dari masyarakat di tempat tersebut. Kemiskinan menciptakan suatu kesenjangan yang diinterpretasikan oleh adanya divisi sosial, kelas, status atau kekuatan.

World Bank dalam *Policy Research Working Papers, Poverty and Policy* (Yudi, 2015) menjelaskan sebab-sebab kemiskinan struktural, yang dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Kurangnya demokrasi hubungan kekuasaan menghilangkan kemampuan warga negara atau suatu negara untuk memutuskan masalah menjadi perhatian mereka.
2. Kurangnya memperoleh alat-alat produksi (lahan dan teknologi) dan sumber daya (pendidikan, kredit, dan akses pasar) oleh mayoritas penduduk.
3. Kurangnya mekanisme yang memadai untuk akumulasi dan distribusi.
4. Disintegrasi ekonomi nasional, yang berorientasi memenuhi pasar asing daripada pasar domestik.

5. Pengikisan peran pemerintah sebagai perantara dalam meminimalkan ketimpangan sosial, contohnya melalui swastanisasi program-program sosial.
6. Eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam dan tercemarnya ekosistem secara tidak proporsional berdampak kepada orang miskin.
7. Kebijakan-kebijakan yang menyebabkan monopolisasi ekonomi dan polarisasi masyarakat yang mengacu bertambahnya penumpukan pendapatan dan kesejahteraan.

Ravi Kanbur dan Lyn Square dalam Yudi (2015:516) menjelaskan bahwa kemiskinan terjadi karena dampak dari kebijakan pemerintah. Pemerintah yang pro-kemiskinan akan melakukan perbaikan di bidang kesehatan sehingga kesehatan akan meningkat dan anak-anak sekolah akan bisa bersekolah dan menerika pelajaran dengan baik. Tingkat pendidikan membuat pekerja memiliki skill yang selanjutnya membuat produktivitasnya meningkat dan pendapatannya meningkat.

Produktivitas yang meningkat meyebabkan ekonomi negara tersebut meningkat dan angka kemiskinan akan berkurang. Namun apabila pemerintah tidak pro kemiskinan, maka kesejahteraan rakyat miskin tidak akan dipedulikan. Fasilitas kesehatan dan pendidikan hanya dapat dinikmati oleh pejabat tinggi dan orang-orang yang mempunyai uang banyak. Di beberapa negara, pemerintah mebuat kebijakan tanpa peduli dengan suara dan kepentingan masyarakat miskin. Mereka hanya memikirkan bagaimana memperkaya diri sendiri.

2.2.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Dalam rangka pembangunan bangsa dibutuhkan modal manusia yang memenuhi kualifikasi keterampilan, pengetahuan dan kompetensi pada berbagai bidang keahlian. Maka diperlukan tolak ukur yang digunakan untuk menilai kualitas pembangunan Manusia, hal ini mendasari adanya ukuran yang ditetapkan oleh *United Nation Development Programme* dalam teori Indeks Pembangunan Manusia yaitu suatu pendekatan yang digunakan sebagai tolak ukur tinggi rendahnya pembangunan manusia.

Menurut Badan Pusat Statistik (2018), Indeks Pembangunan Manusia merupakan ukuran capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen kualitas hidup atau indikator yang menjelaskan bagaimana penduduk suatu wilayah mempunyai kesempatan untuk mengakses hasil dari suatu pembangunan sebagai bagian dari haknya dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Indeks Pembangunan manusia merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam tiga hal mendasar pembangunan manusia, yaitu lamanya hidup yang diukur dengan harapan hidup, tingkat pendidikan yang diukur dengan angka huruf melek pada penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah, serta tingkat kehidupan layak yang diukur dengan pengeluaran per kapita. Penghitungan IPM sebagai indikator pembangunan manusia memiliki tujuan penting, antara lain :

- a. Membangun indikator yang mengukur dimensi dasar pembangunan manusia dan perluasan kebebasan memilih
- b. Memanfaatkan sejumlah indikator untuk menjaga ukuran tersebut sederhana

- c. Membentuk suatu indeks komposit daripada menggunakan sejumlah indeks dasar
- d. Menciptakan suatu yang mencakup aspek sosial ekonomi

Rumus yang digunakan dalam menghitung Indeks Pembangunan Manusia

adalah sebagai berikut:

$$IPM = 1/3 (\text{Indeks } X1 + \text{Indeks } X2 + \text{Indeks } X3)$$

Dimana :

X1 : lamanya hidup

X2 : tingkat pendidikan

X3 : tingkat kehidupan yang layak

(Badan Pusat Statistik, 2012)

Sebelum menghitung IPM, setiap komponen dari setiap indeksnya harus dihitung terlebih dahulu dengan formula sebagai berikut :

$$\text{Indeks } X(i,j) = \frac{X(i,j) - X(i-\text{min})}{X(i-\text{max}) - X(i-\text{min})}$$

Dimana :

X(i,j) : Indikator ke i dari daerah j

X(i-min) : nilai minimum Xi

X(i-max) : nilai maksimum Xi

Tabel 2.1

Nilai Minimum dan Maksimum Komponen IPM

Indikator Komponen	Nilai Minimum	Nilai Maksimum
Angka Harapan Hidup	25	85

Angka Melek Huruf	0	100
Rata-rata Lama Sekolah	0	100
<i>Purchasing Power Parity (PPP)</i>	360.000	737.720

Sumber : BPS 2018

IPM memberikan peringkat dari skala 0 (terendah) hingga 100 (tertinggi) untuk mengevaluasi keberhasilan suatu daerah atau negara. IPM terbagi menjadi tiga kategori pemeringkatan. Kategori pemeringkatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Kategori Peringkat IPM

Kategori	Skala
Tinggi	IPM > 80
Menengah ke atas	66 < IPM < 80
Menengah ke bawah	50 < IPM < 66
Rendah	IPM < 50

Sumber: BPS 2018

Berdasarkan kajian teori pembangunan manusia maka untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia dalam penelitian ini menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan indikator yang digunakan untuk mencapai pembangunan manusia.

2.2.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Indikator penting untuk dapat mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah dalam kurun waktu tertentu ialah menggunakan data Produk Domestik Regional

Bruto (PDRB), dapat menggunakan atas dasar harga berlaku ataupun atas dasar harga konstan.

Badan Pusat Statistik, mendefinisikan PDRB sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya. Oleh karena itu, besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat bergantung kepada potensi faktor-faktor produksi di daerah tersebut (Yudi, 2015:518).

Cara perhitungan PDRB dapat diperoleh melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran.

1. Menurut Pendekatan Produksi

PDRB adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh suatu unit kegiatan ekonomi di daerah tersebut dikurangi biaya antara masing-masing kegiatan ekonomi di daerah tersebut dikurangi biaya antara masing-masing total produksi bruto tiap kegiatan subsektor atau sektor dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 9 sektor atau lapangan usaha yaitu (1) pertanian, (2) pertambangan dan penggalan, (3) industri pengolahan, (4) listrik, gas dan air bersih, (5) bangunan, (6) perdagangan, hotel dan restoran, (7) pengangkutan dan komunikasi, (8) keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan (9) jasa-jasa.

2. Menurut Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah penjumlahan semua komponen permintaan akhir.

Komponen-komponen tersebut meliputi:

- a. Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung
- b. Konsumsi pemerintah
- c. Pembentukan modal tetap domestik bruto
- d. Perubahan stok
- e. Ekspor netto

3. Menurut Pendekatan Pendapatan

PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa rumah, bunga modal dan keuntungan. Semua hitungan tersebut sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak lainnya. Cara penyajian PDRB disusun dalam dua bentuk, yaitu:

a. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK)

Menurut BPS pengertian PDRB ADHK yaitu jumlah nilai produksi, pengeluaran atas pendapatan yang dihitung menurut harga tetap. Dengan cara menilai kembali atau mendefinisikan berdasarkan harga-harga pada tingkat dasar dengan menggunakan indeks harga konsumen. Dari perhitungan ini tercermin tingkat kegiatan ekonomi yang sebenarnya melalui PDRB riilnya.

b. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB)

Pengertian PDRB ADHB menurut BPS adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Maksud dari nilai tambah yaitu merupakan nilai yang ditambahkan kepada barang dan jasa yang dipakai oleh unit produksi dalam proses produksi sebagai input antara nilai yang ditambahkan ini sama dengan balas jasa atas ikut sertanya faktor produksi dalam proses produksi.

2.2.4 Tingkat Pengangguran

Dalam arti luas, tingkat pengangguran menurut Rubiyanto (2013:54) adalah sebagian dari faktor-faktor produksi yang berupa alam, tenaga kerja, modal dan manajemen yang tidak digunakan karena produksi nyata (*actual output*) suatu perekonomian lebih kecil apabila dibandingkan dengan jumlah produk nasional bruto potensial. Sedangkan dalam arti sempit pengangguran adalah sebagian tenaga kerja yang tidak digunakan karena produksi nyata lebih rendah daripada produk nasional bruto potensial. Menurut Christopher Pass (dalam Rubiyanto, 2013:67), pengangguran tersebut hanya berwujud tenaga kerja dan modal, sebab modal juga termasuk alam dan manajemen.

Salah satu faktor penting yang menentukan kemakmuran masyarakat adalah tingkat pendapatannya. Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dapat diwujudkan. Pengangguran akan mengurangi pendapatan masyarakat, dan hal ini akan mengurangi tingkat kemakmuran yang mereka capai. Menurut Sukirno (2014:518), pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Sedangkan

seseorang yang tidak bekerja, tetapi tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak digolongkan sebagai penganggur.

Pengangguran adalah seseorang yang tergolong angkatan kerja dan ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperoleh memperolehnya (Rubiyanto, 2013:69). Masalah pengangguran yang menyebabkan tingkat pendapatan nasional dan tingkat kemakmuran masyarakat tidak mencapai potensi maksimal yaitu masalah pokok makro ekonomi yang paling utama.

Menurut BPS Jawa Tengah (2018), pengangguran adalah angkatan kerja yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari atau mengaharap pekerjaan, orang yang merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan dan orang yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Untuk mengelompokkan masing-masing penangguran menurut Edgar O. Edward (dalam Arsyad, 2014:117) perlu diperhatikan dimensi-dimensi:

1. Waktu (banyak diantara mereka yang ingin bekerja lebih lama, misalnya jam kerjanya per hari, per minggu atau per tahun)
2. Intensitas pekerjaan (yaang berkaitan dengan kesehatan dan gizi makanan)
3. Produktivitas (kurangnya produktivitas seringkali disebabkan oleh kurangnya sumber daya – sumber daya komplementer untuk melakukan pekerjaan).

Walaupun hal-hal tersebut merupakan dimensi-dimensi yang paling jelas untuk efektifnya seseorang bekerja, faktor-faktor seperti motivasi, sikap, dan hambatan-hambatan budaya juga harus diperhatikan.

Pengangguran pada prinsipnya mengandung arti hilangnya output dan kesengsaraan bagi orang yang tidak bekerja, dan merupakan suatu bentuk pemborosan sumber daya ekonomi. Disamping memperkecil output, pengangguran juga memacu pengeluaran pemerintah lebih tinggi untuk keperluan kompensasi pengangguran dan kesejahteraan.

2.2.4.1 Jenis-Jenis Pengangguran

Jenis pengangguran menurut Christopher Pass (Rubiyanto, 2013:56) mengemukakan beberapa jenis pengangguran sebagai berikut:

1. Pengangguran Struktural (*struktural unemployment*), yaitu jenis pengangguran jangka panjang yang disebabkan oleh berkurangnya kegiatan produksi perusahaan-perusahaan tertentu atau karena adanya perubahan dalam proses produksi. Keadaan ini terjadi karena adanya perubahan pola permintaan masyarakat yang akan merubah pola produksi yang berakibat berkurangnya keperluan akan tenaga kerja.
2. Pengangguran teknologi (*technological unemployment*), merupakan pengangguran sebagai akibat dari otomasisasi dalam kegiatan produksi di sektor industri. Otomasisasi dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja, akibatnya timbulah pengangguran. Kalau saja permintaan akan barang-barang juga meningkat sebanding dengan kenaikan produktivitas tenaga kerja pengangguran akan dapat dicegah.
3. Pengangguran regional (*regional unemployment*), adalah bentuk pengangguran struktural yang timbul karena merosotnya kegiatan produksi

pada industri tertentu, misalnya pembangunan kapal dan produksi baja yang sebagian besar kegiatannya terpusat di wilayah tertentu dalam suatu negara.

4. Pengangguran tak nampak/tercatat (*concealed unemployment*), ialah mereka yang mampu dan bersedia untuk bekerja dan mencari pekerjaan, namun tidak mencatatkan diri sebagai pengangguran, sehingga jumlah penganggur resmi lebih besar daripada yang tercatat.
5. Pengangguran musiman (*seasonal unemployment*), merupakan bentuk pengangguran sebagai akibat adanya perubahan permintaan atas barang-barang tertentu yang disebabkan perubahan musim dalam suatu tahun. Sebagai misal produksi payung terpaksa dihentikan karena adanya perubahan musim penghujan menjadi musim kemarau.

Sedangkan menurut Eddgar O. Edwards (Rubiyanto, 2013:44), mengemukakan beberapa jenis-jenis pengangguran sebagai berikut:

1. Pengangguran terbuka (*open unemployment*), berwujud pengangguran sukarela dan tidak sukarela. Penganggur sukarela adalah orang-orang yang memiliki kemampuan untuk bekerja, tetapi mereka itu tidak bersedia untuk bekerja dan baru akan bekerja apabila jenis pekerjaan yang ditawarkan sesuai dengan pendidikan dan kemampuan mereka. Penganggur tidak sukarela adalah orang-orang yang bersedia untuk bekerja namun tidak ada lowongan pekerjaan untuk mereka.
2. Setengah menganggur (*underemployment*), yaitu orang-orang yang bekerja dalam jangka waktu lebih singkat daripada yang mereka harapkan. Mereka

mengharapkan dapat bekerja delapan jam dalam satu hari namun hanya tersedia pekerjaan dua jam dalam sehari.

3. Kelihatannya aktif bekerja namun tidak produktif, biasanya mereka itu tidak digolongkan sebagai penganggur terbuka atau setengah menganggur.

Mereka itu terdiri dari:

- a. Pengangguran tersamar (*disguised unemployment*), mereka yang kelihatannya bekerja sepenuhnya di daerah pertanian atau di kantor-kantor pemerintah (pegawai negeri) namun sebenarnya pekerjaan yang mereka lakukan tersebut tidak menuntut waktu sebanyak itu. Misalnya saja suatu pekerjaan yang sebenarnya dapat diselesaikan dalam waktu dua jam, mereka selesaikan dalam kurun waktu lima jam.
 - b. Pengangguran tersembunyi (*hidden unemployment*) mereka yang bekerja sebagai “pilihan kedua” yang disebabkan tidak ada jenis pekerjaan lain yang sesuai dengan bakat, pendidikan, dan kemampuan. Mereka terpaksa mengisi lowongan pekerjaan seadanya daripada menganggur. Misalnya seseorang terpaksa bekerja dalam bidang pendidikan sebagai guru, atau sebagai pembantu rumah tangga karena tidak ada pilihan lainnya.
 - c. Pensiun dipercepat (*premature retirement*), pegawai negeri yang dipensiun lebih cepat guna memberi kesempatan kepada pegawai yang lebih muda untuk memperoleh promosi jabatan.
4. Pekerja yang lemah (*the impaired*), adalah mereka yang kelihatannya bekerja sepenuhnya namun hasil kerja sangat rendah karena kekurangan gizi atau raga kurang sehat.

5. Tenaga yang tidak produktif (*the unproductive*), merupakan tenaga kerja yang memiliki cukup kemampuan untuk melakukan pekerjaan secara produktif namun tidak memilih peralatan modal yang cukup handal untuk menyelesaikan pekerjaannya.

2.2.4.2 Jenis Pengangguran Menurut Penyebabnya

Menurut Rubiyanto (2013:54), macam-macam pengangguran berdasarkan penyebab terjadinya dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu :

1. Pengangguran konjungtural (*Cycle Unemployment*) adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan gelombang (naik-turunnya) kehidupan perekonomian/siklus ekonomi.
2. Pengangguran struktural (*Struktural Unemployment*) adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan struktur ekonomi dan corak ekonomi dalam jangka panjang.
3. Pengangguran friksional (*Frictional Unemployment*) adalah pengangguran yang muncul akibat adanya ketidaksesuaian antara pemberi kerja dan pencari kerja. Pengangguran ini sering disebut pengangguran sukarela.
4. Pengangguran musiman adalah pengangguran yang muncul akibat pergantian musim misalnya pergantian musim tanam ke musim panen.
5. Pengangguran teknologi adalah pengangguran yang terjadi akibat perubahan atau penggantian tenaga manusia menjadi tenaga mesin-mesin.
6. Pengangguran siklus adalah pengangguran yang diakibatkan oleh menurunnya kegiatan perekonomian (karena terjadi resesi). Pengangguran

siklus disebabkan oleh kurangnya permintaan masyarakat (*aggrerat demand*).

Berdasarkan kajian teori mengenai pengangguran, maka dalam penelitian ini pengangguran yang dimaksud adalah suatu keadaan dimana seseorang yang mampu dan ingin bekerja tetapi tidak ada pekerjaan yang tersedia bagi mereka.

2.2.5 Investasi

Pada suatu negara atau daerah selalu salah satu orientasi kebijakan pembangunan ekonomi adalah meningkatkan investasi manusia maupun investasi dalam sektor riil. Harrod Domar menjelaskan investasi sebagai motor penggerak utama pembangunan ekonomi, karena : (1) investasi dapat menciptakan tambahan pendapatan; dan (2) investasi dapat pula memperbesar kapasitas produksi melalui meningkatnya persediaan modal, yang disebut efek penawaran. Keynes memberi perhatian terhadap alasan pertama, sementara kaum klasik menekankan kepada efek penawaran. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi suatu negara akan mantap dan berkelanjutan apabila peranan investasi berjalan secara paralel untuk kedua alasan diatas (Tan, 2013:217).

Karena modal adalah faktor produksi yang diproduksi, maka masyarakat dapat mengubah jumlah modal yang dimilikinya. Jika pada saat ini perekonomian menghasilkan modal-modal baru dalam jumlah besar, maka pada saat mendatang akan tersedia lebih banyak modal untuk memproduksi lebih banyak jenis barang dan jasa. Dengan demikian, salah satu cara meningkatkan produktivitas masa depan adalah dengan menginvestasikan lebih banyak sumber daya yang ada untuk memproduksi modal (Mankiw, 2016:82).

Tan dan Tan (2014:221), mengatakan bahwa secara spesifik investasi dapat dikelompokkan kedalam Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Khusus untuk PMA, pada umumnya investasi asing dibutuhkan dalam kerangka menutup gap devisa yang ditimbulkan oleh defisit dalam transaksi berjalan pada neraca pembayaran. Sementara gap devisa tersebut sebagai dampak dari defisit pada neraca perdagangan barang dan jasa. Defisit dalam transaksi berjalan tersebut ditutup aliran modal (*capital inflow*) termasuk PMA.

$$\text{Investasi} = \text{PMDN} + \text{PMA}$$

$$\text{Current Account} = \text{Transaksi modal} + \text{PMA}$$

Selain untuk menutup gap devisa, masuknya modal asing juga mampu menggerakkan kegiatan ekonomi yang lesu akibat kurangnya modal yang disebut *saving investment gap* ($I > S$) untuk pelaksanaan pembangunan suatu negara.

Secara mikro dana investasi bersumber dari dana tabungan yang merupakan sisa pendapatan setelah dikonsumsi ($S = Y - C$). Sementara secara makro, tabungan disebut Tabungan Nasional Bruto (TNB) yang merupakan selisih antara pendapatan nasional setelah dikurangi dengan pengeluaran ($\text{TNB} = \text{GNB} - G$). Semakin besar pendapatan nasional akan semakin besar tabungan nasional, dengan asumsi peningkatan jumlah pengeluaran relatif lambat. Dalam konteks pembangunan daerah juga dikenal dengan tabungan daerah. Dalam arti sempit, dikenal dengan Selisih Penggunaan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya yang dapat digunakan untuk tahun berikutnya. Tabungan daerah dapat juga bersumber

dari dana-dana daerah yang disimpan pada perusahaan daerah misalnya BPD dan perusahaan lain (Tan, 2013:222).

2.2.6 Kawasan Andalan dan Bukan Andalan

Pemerintah melalui UU No. 32 Tahun 2004 tentang “Pemerintah Daerah” dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang “Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah” yang membahas tentang kebijakan pemerintah pusat dalam melimpahkan wewenang untuk mengatur urusan rumah tangga daerahnya sendiri kepada pemerintah daerah melalui perencanaan dan pengelolaan pembangunan daerah yang didasarkan pada kemampuan ataupun potensi yang ada serta permasalahan yang harus dihadapi di daerah tersebut.

Pelimpahan wewenang yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada daerah diharapkan dapat menghilangkan praktik sentralistik dimana pembangunan dan pertumbuhan ekonomi hanya terpusat di kota besar saja, yang pada satu sisi dirasa kurang menguntungkan daerah dan penduduk lokal. Dalam rangka melakukan pemerataan pembangunan daerah di segala penjuru negeri, era otonomi daerah merupakan hal yang paling penting, karena dirasa dapat meningkatkan motivasi daerah untuk mau mengembangkan diri menjadi daerah yang maju dengan tingkat kesejahteraan yang meningkat dan dapat bersaing dengan daerah lain. Selain itu, untuk pengaktualisasian pribadi daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang dapat diwujudkan dengan pemanfaatan potensi local serta dilakukannya pemanfaatan kekuatan daerah dan peluang yang muncul untuk mengembangkan berbagai kegiatan-kegiatan perekonomian untuk mencapai kemakmuran rakyat dan keadilan sosial.

Berlakunya kebijakan pembangunan daerah dengan konsep kawasan andalan oleh pemerintah bertujuan untuk mempersempit jurang disparitas antar daerah yang kemudian disandarkan pada kekuatan lokal yang dimiliki. Kebijakan kawasan andalan diterapkan dengan harapan dapat terwujudnya kesamarataan tingkat pertumbuhan ekonomi serta keseimbangan pendapatan perkapita daerah, sehingga dapat memperkecil bahkan menutupi kesenjangan ekonomi yang ada antara perkembangan pulau jawa maupun luar jawa (Kuncoro, 2017:98).

Menurut Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jateng 2003 mendefinisikan Kawasan Andalan merupakan kawasan yang ditetapkan dengan tujuan untuk dibudidayakan berdasarkan potensi lokal yang dimiliki yang diyakini dapat merangsang iklim ekonomi yang baik, yang dapat ditinjau dari peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak hanya untuk kawasan itu sendiri namun juga bagi kawasan sekitarnya.

Konsep Kawasan Andalan menurut Kuncoro (2017:121) merupakan kawasan cepat tumbuh dan maju diantara daerah lainnya dalam satu provinsi, kawasan andalan juga diyakini memiliki sektor unggulan yang telah terspesialisasikan, yang dapat berperan sebagai penggerak perekonomian daerah serta memiliki kaitan dengan daerah di sekitarnya. Terjadinya pertumbuhan ekonomi di kawasan andalan diyakini dapat memberi imbas positif tidak hanya untuk daerah tersebut, namun juga daerah sekitarnya dengan diberdayakannya sektor serta subsektor unggulan yang dapat menjadi mesin penggerak perekonomian daerah. Penekanan pada pertumbuhan ekonomi sebagai arah

kebijakan penetapan Kawasan Andalan dikarenakan pertumbuhan ekonomi merupakan variabel ekonomi yang merupakan indikator inti dalam pembangunan.

Analisis Tipologi Klassen dalam hal ini membagi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan per kapita daerah. Kriteria yang digunakan untuk membagi daerah kabupaten/ kota adalah sebagai berikut:

1. Daerah cepat maju dan cepat tumbuh adalah daerah yang memiliki rata-rata tingkat pertumbuhan PDRB dan rata-rata PDRB per kapita lebih tinggi daripada tingkat provinsi yang diacunya.
2. Daerah maju tetapi tertekan adalah daerah yang memiliki rata-rata PDRB per kapita lebih tinggi tetapi rata-rata tingkat pertumbuhan PDRB lebih rendah daripada tingkat provinsi yang diacunya.
3. Daerah berkembang cepat adalah daerah yang memiliki rata-rata tingkat pertumbuhan PDRB lebih tinggi tetapi rata-rata PDRB per kapita lebih rendah daripada tingkat provinsi yang diacunya.
4. Daerah relatif tertinggal adalah daerah yang memiliki rata-rata tingkat pertumbuhan PDRB dan rata-rata PDRB per kapita lebih rendah daripada tingkat provinsi yang diacunya.

PDRB per kapita Laju Pertumbuhan	$Y_i = Y_n$	$Y_i < Y_n$
	$r_i = r_n$	Daerah maju dan tumbuh cepat
$r_i < r_n$	Daerah maju tetapi tertekan	Daerah relatif tertinggal

Gambar 2.2 Tipologi Klassen

Keterangan :

r_i : Laju pertumbuhan PDRB daerah i

r_n : Laju pertumbuhan PDRB provinsi

Y_i : Pendapatan per kapita daerah i

Y_n : Pendapatan per kapita provinsi

2.3 Kerangka Berfikir

2.3.1 Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Kemiskinan

Teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya peranan pemerintah terutama dalam meningkatkan pembangunan modal manusia (*human capital*) dan mendorong penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas manusia. Kenyataannya dapat dilihat dengan melakukan investasi pendidikan akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diperlihatkan dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas kerjanya.

Perusahaan akan memperoleh hasil yang lebih banyak dengan memperkerjakan tenaga kerja dengan produktivitas yang tinggi, sehingga perusahaan juga akan bersedia memberikan gaji yang lebih tinggi bagi yang bersangkutan. Di sektor informal seperti pertanian, peningkatan keterampilan dan keahlian tenaga kerja akan mampu meningkatkan hasil pertanian, karena tenaga kerja yang terampil mampu bekerja lebih efisien. Pada akhirnya seseorang yang memiliki produktivitas yang tinggi akan memperoleh kesejahteraan yang lebih baik, yang diperlihatkan melalui peningkatan pendapatan maupun

konsumsinya. Rendahnya produktivitas kaum miskin dapat disebabkan oleh rendahnya akses mereka untuk memperoleh pendidikan (Rasidin dalam Saputra, 2014:201).

Lanjouw dalam Saputra (2014:203) menyatakan pembangunan manusia di Indonesia adalah identik dengan pengurangan kemiskinan. Investasi di bidang pendidikan dan kesehatan akan lebih berarti bagi penduduk miskin dibandingkan penduduk tidak miskin, karena bagi penduduk miskin aset utama adalah tenaga kasar mereka. Adanya fasilitas pendidikan dan kesehatan murah akan sangat membantu untuk meningkatkan produktifitas, dan pada gilirannya meningkatkan pendapatan.

2.3.2 Pengaruh PDRB Terhadap Kemiskinan

Todaro dalam Yudi (2015:522) mengatakan pembangunan ekonomi mensyaratkan pendapatan nasional yang lebih tinggi hal itu akan tercapai apabila tingkat pertumbuhan perekonomian suatu negara juga tinggi. Sejalan dengan itu, Kuncoro menyebutkan bahwa pendekatan pembangunan tradisional lebih dimaknai sebagai pembangunan yang memfokuskan pada usaha peningkatan PDRB suatu provinsi, kabupaten, atau kota.

Menurut Sukirno dalam Yudi (2015:515), laju pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan PDRB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil. Selanjutnya pembangunan ekonomi tidak semata-mata diukur berdasarkan pertumbuhan PDRB secara keseluruhan, tetapi harus memperlihatkan sejauh mana distribusi pendapatan telah menyebar ke lapisan masyarakat serta siapa yang telah menikmati hasil-hasilnya. Sehingga menurunnya PDRB suatu

daerah berdampak pada kualitas dan pada konsumsi rumah tangga. Dan apabila tingkat pendapatan penduduk sangat terbatas, banyak rumah tangga miskin terpaksa merubah pola makanan pokoknya ke barang paling murah dengan jumlah barang yang berkurang.

Mekanisme transmisi pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan yang dipelopori oleh Paul M Romer dengan menggunakan teori pertumbuhan baru yaitu teori pertumbuhan endogen. Secara lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa, ketika suatu rumah tangga memiliki pendapatan sedikit di atas garis kemiskinan dan pertumbuhan pendapatannya sangat lambat yaitu di bawah laju inflasi, maka barang dan jasa yang dibelinya menjadi lebih sedikit.

Siregar dalam Yudi (2015:518) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan syarat keharusan (*necessary condition*) bagi pengurangan kemiskinan. Selain itu, syarat kecukupan (*sufficient condition*) adalah bahwa pertumbuhan tersebut efektif dalam mengurangi kemiskinan. Artinya, pertumbuhan itu hendaknya menyebar di setiap golongan pendapatan, termasuk di golongan penduduk miskin.

Menurut Kuznet dikutip dari Tulus Tambunan dalam Saputra (2014:67), pertumbuhan dan kemiskinan mempunyai korelasi yang sangat kuat, karena pada tahap awal proses pembangunan tingkat kemiskinan cenderung meningkat dan pada saat mendekati tahap akhir pembangunan jumlah orang miskin berangsur-angsur berkurang.

2.3.3 Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap Kemiskinan

Tingkat pengangguran dapat memberikan gambaran sesungguhnya mengenai kesehatan ekonomi suatu negara. Tingkat pengangguran merupakan indikator yang biasa digunakan oleh pelaku pasar untuk menganalisis sehat atau tidaknya perekonomian suatu negara. Rendahnya suatu tingkat pengangguran menunjukkan semakin sehatnya perekonomian negara. Hal ini akan berdampak pada besarnya peluang untuk berinvestasi. Sedangkan tingginya tingkat pengangguran akan diterjemahkan sebagai kemunduran kesehatan perekonomian negara. Tingkat pengangguran menunjukkan persentase individu-individu yang ingin bekerja namun tidak memiliki pekerjaan. Tingkat pengangguran dihitung berdasarkan rasio antara jumlah penganggur dengan angkatan kerja.

Pengangguran di satu sisi menunjukkan adanya selisih antara permintaan (*demand for labor*) dan penawaran tenaga kerja (*supply of labor*) dalam suatu perekonomian. Diluar itu terdapat juga sebab-sebab non ekonomis seperti pranata, sikap dan pola tingkah laku yang berhubungan dengan pengamanan hak kerja, serta keinginan si penganggur untuk menerima jenis pekerjaan yang lebih cocok dengan kualifikasi, aspirasi atau selera mereka.

Menurut Sadono Sukirno (2014:513), efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dicapai seseorang. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Apabila pengangguran di suatu negara sangat buruk, kekacauan politik dan sosial selalu

berlaku dan menimbulkan efek yang buruk bagi kepada kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang.

2.3.4 Pengaruh Investasi Terhadap Kemiskinan

Mengurangi kemiskinan perlu adanya peran investasi baik dari pemerintah maupun swasta. Investasi pemerintah dijalankan melalui instrumen kebijakan, yaitu pengeluaran pemerintah untuk investasi. Investasi dari sektor swasta bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri (asing). Investasi yang bersumber dari dalam, yaitu tabungan masyarakat, tabungan pemerintah, dan penerimaan devisa. Investasi merupakan suatu kegiatan penggunaan uang untuk menyediakan barang modal, dimana barang modal ini dimanfaatkan untuk menghasilkan laba dimasa yang akan datang.

Menurut Sadono Sukirno (2016:509) kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber daritiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni (1) investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja; (2) penambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi; (3) investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi.

Investasi merupakan penghubung yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan (Ocaya et al, 2012:78). Besarnya investasi yang

masuk akan memberikan dorongan yang kuat pada pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan menurunkan tingkat kemiskinan.

2.3.5 Pengaruh Dummy (Kawasan andalan dan bukan andalan) Terhadap Kemiskinan

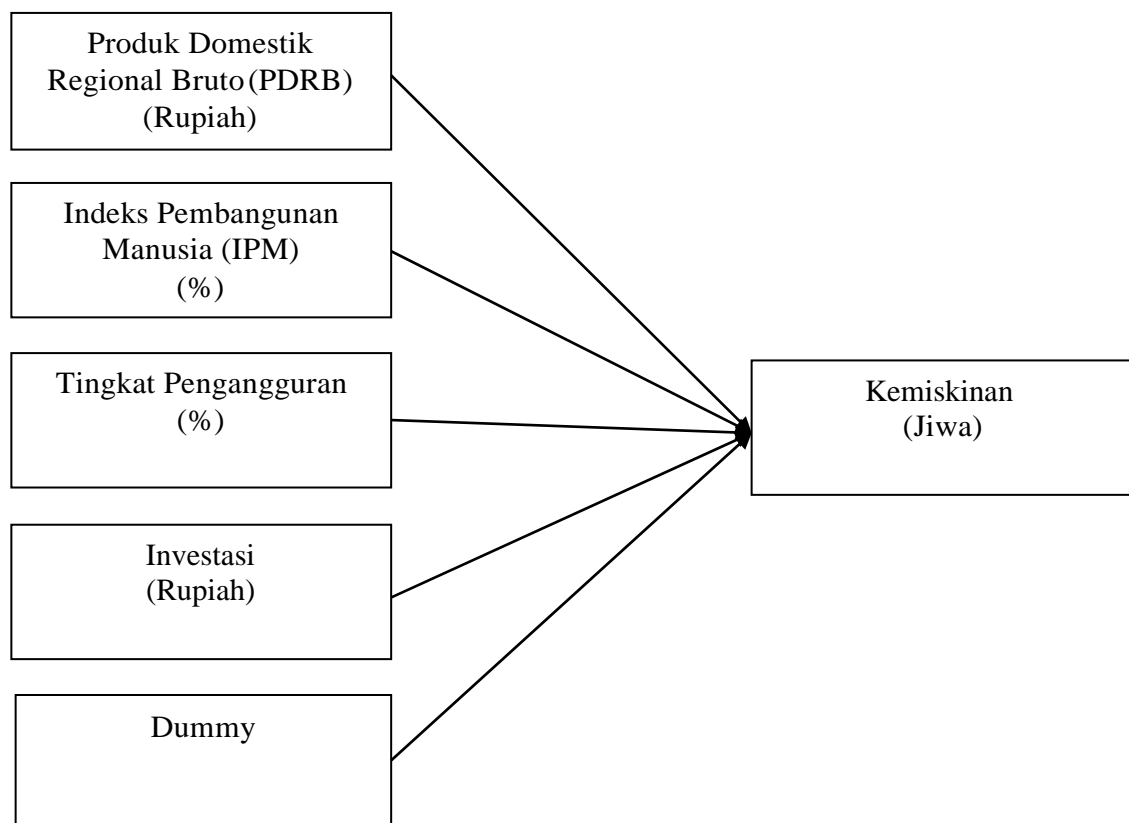
Kawasan Andalan menurut Kuncoro (2017:121) merupakan kawasan cepat tumbuh dan maju diantara daerah lainnya dalam satu provinsi, kawasan andalan juga diyakini memiliki sektor unggulan yang telah terspesialisasikan, yang dapat berperan sebagai penggerak perekonomian daerah serta memiliki kaitan dengan daerah di sekitarnya. Terjadinya pertumbuhan ekonomi di kawasan andalan diyakini dapat memberi imbas positif tidak hanya untuk daerah tersebut, namun juga daerah sekitarnya dengan diberdayakannya sektor serta subsektor unggulan yang dapat menjadi mesin penggerak perekonomian daerah. Penekanan pada pertumbuhan ekonomi sebagai arah kebijakan penetapan Kawasan Andalan dikarenakan pertumbuhan ekonomi merupakan variabel ekonomi yang merupakan indikator inti dalam pembangunan.

Kawasan andalan merupakan kawasan yang ditetapkan sebagai penggerak perekonomian wilayah (*prime mover*) yang memiliki kriteria sebagai kawasan yang lebih cepat tumbuh dibandingkan daerah lainnya dalam suatu propinsi, memiliki sektor unggulan, dan memiliki keterkaitan ekonomi dengan daerah sekitar (Amin, 2009:127).

Jika suatu Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah menjadi kawasan andalan, maka jumlah kemiskinan berkurang namun jika suatu Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah menjadi kawasan bukan andalan, maka jumlah kemiskinan bertambah.

Pertumbuhan kawasan andalan diharapkan dapat memberikan imbas positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah sekitar melalui pemberdayaan sektor unggulan sebagai penggerak perekonomian daerah dan keterkaitan ekonomi antardaerah. Penekanan pada pertumbuhan ekonomi sebagai arah kebijakan penetapan kawasan andalan adalah mengingat pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu variabel ekonomi yang menjadi indikator kunci dalam pembangunan.

Kerangka pemikiran mengenai Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah pengangguran, investasi dan Dummy terhadap kemiskinan dapat disajikan dalam gambar berikut:



Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah suatu penjelasan sementara tentang perilaku, fenomena, atau keadaan tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi. Hipotesis juga dapat diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian (Sugiyono, 2011:91). Berdasarkan landasan teori tersebut, maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

- H₁ : Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018.
- H₂ : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh negatif terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018.
- H₃ : Tingkat Pengangguran berpengaruh positif terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018.
- H₄ : Investasi berpengaruh negatif terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018.
- H₅ : Terdapat perbedaan Kemiskinan antara daerah andalan dan non andalan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. IPM memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dikarenakan bahwa menurunnya kemiskinan saat IPM meningkat merupakan indikasi bahwa peningkatan IPM merupakan tingginya kualitas sumber daya manusia yang akan berakibat pada meningkatnya produktifitas kerja penduduk yang akan meningkatkan pendapatan. Dengan pendapatan yang meningkat maka akan menyebabkan masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidupnya serta dapat menurunkan tingkat kemiskinan.
2. PDRB memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah. Pertumbuhan PDRB semakin tinggi, maka penurunan kemiskinan semakin cepat. Penurunan kemiskinan hampir selalu diikuti peningkatan pendapatan rata-rata perkapita atau standar kehidupan, Apabila pendapatan masyarakat bertambah maka dapat diperkirakan masyarakat akan terbebas dari kemiskinan. dan sebaliknya kemiskinan bertambah jika PDRB menurun.
3. Tingkat Pengangguran tidak signifikan terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah.

4. Investasi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah. Sehingga dapat dikatakan bahwa jika nilai investasi mengalami kenaikan maka kemiskinan akan mengalami penurunan. kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat sehingga menyebabkan jumlah kemiskinan berkurang.
5. Dummy (Kawasan andalan dan bukan andalan) tidak signifikan terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil estimasi pada penelitian maka saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. IPM mengindikasikan faktor kesehatan, pendidikan serta daya beli masyarakat perlu ditingkatkan lagi oleh pemerintah. Pemerintah juga perlu meningkatkan lagi pelayanan di sektor pendidikan secara gratis bagi masyarakat miskin. Sehingga kualitas sumber daya manusia meningkat yang diharapkan dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Perhatian pemerintah terhadap kesehatan juga masih perlu ditingkatkan lagi dengan pelayanan kesehatan gratis, memperbanyak puskesmas khususnya pada masyarakat desa miskin dan tertinggal.
2. Pengangguran berdasarkan hasil penelitian berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan, dengan hasil tersebut diharapkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah lebih banyak lagi melakukan perluasan

kesempatan kerja dengan cara mendirikan industri-industri baru yang bersifat padat karya serta menggalakkan pengembangan sektor informal, seperti *home industry*. Karena pengangguran dalam penelitian ini menggunakan data pengangguran terbuka, yang mana di dalamnya terdapat golongan masyarakat yang sedang mencari pekerjaan dan sedang dalam tahap menyiapkan usaha atau mendapat pekerjaan tetapi belum mulai bekerja yang dimasukkan dalam golongan pengangguran. Sehingga pentingnya perluasan kesempatan kerja yang bersifat padat karya dan peningkatan sektor informal untuk menekan kemiskinan di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

3. Posisi perekonomian suatu wilayah sebagai penentu kebijakan perlu diperhatikan sehingga keberadaan kawasan andalan perlu ditinjau dari waktu ke waktu secara berkesinambungan agar manfaat yang diperoleh bagi pertumbuhan daerah dan wilayah sekitarnya benar-benar dapat dirasakan. Selain itu, Pengembangan perekonomian suatu daerah melalui kebijakan pembangunan yang serasi dan efektif sebaiknya perlu koordinasi dan kerjasama antar wilayah baik yang berada dalam satu provinsi maupun di daerah perbatasan provinsi.
4. Masyarakat harus ikut berperan dalam upaya mengurangi kemiskinan dengan dimulai dari diri sendiri dan Masyarakat harus ikut berperan dalam partisipasi berupa kegiatan pelatihan peningkatan keterampilan agar masyarakat lebih mandiri dengan mengasah keterampilan atau keahlian untuk membuka peluang usaha sendiri agar meningkatkan pendapatan.

5. Model yang dikembangkan dalam penelitian ini masih terbatas karena hanya melihat pengaruh IPM, PDRB, Tingkat Pengangguran, Investasi dan Dummy (Kawasan andalan dan bukan andalan) terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah. Oleh karenanya diperlukan studi lanjutan yang lebih mendalam dengan data dan metode yang lebih lengkap sehingga dapat melengkapi hasil penelitian yang telah ada dan hasilnya dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan berbagai pihak yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi dalam hal penekanan kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Acharya, Sanjaya., Nuriev, & Shamsimukhamed. 2016. "Role of Public Investment in Growth and Poverty Reduction in Transition Economies". *Journal of Reviews on Global Economics*, (5): 310-326.
- Agus Widarjono. 2016. *Statistika Terapan Dengan Excel & SPSS*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Aimon, Hasdi. 2012. "Produktivitas, Investasi Sumberdaya Manusia, Investasi Fisik, Kesempatan Kerja terhadap Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia". *Jurnal Kajian Ekonomi*, 1(1): 209-218.
- Akhmad. 2016. "Impact of Local Government Expenditure on the Poverty of South Sulawesi Province in Indonesia". *Journal of Applied Sciences Research*, 12(9): 1-9.
- Alhudori, M. 2017. "Pengaruh IPM, PDRB dan Jumlah Pengangguran Terhadap Penduduk Miskin di Provinsi Jambi". *Jurnal of Economics and Business*. Vol.1 No.1.
- Amali, M. 2017. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia dan Belanja Langsung terhadap Kemiskinan Kabupaten /Kota di Provinsi Jambi". *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*. Vol.17 No.2.
- Amalia, Fitri. 2012. "Pengaruh Pendidikan, Pengangguran dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia Periode 2001-2010". *Econosains*. Vol.10 No.2.
- Amaluddin, A., Payapo, R.W., Laitupa, A.A., & Serang, M.R. 2018. "A Modified Human Development Index and Poverty in the Villages of West Seram Regency, Maluku Province, Indonesia". *International Journal of Economics and Financial Issues*, 8(2): 325-330.
- Andykha, R., Handayani, H.R., & Woyanti, N. 2018. "Analisis Pengaruh PDRB, Tingkat Pengangguran, dan IPM Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah". *Media Ekonomi dan Manajemen*. Vol.33 No.2.

- Anggadini, F. 2015. "Analisis Pengaruh Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Pendapatan Domestik Regional Bruto Perkapita Terhadap Kemiskinan Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2010-2013". *e-Jurnal Katalogis*, 3(7): 40-49.
- Annur, R.A. 2013. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Kecamatan Jekolo dan Mejobo Kabupaten Kudus Tahun 2013". *Economics Development Analysis Journal*, 2(4): 409-426.
- Arabyat, Y.A. 2017. "The Impact of Foreign Direct Investment on Poverty Reduction in the Developing Countries". *International Finance and Banking*. Vol.4 No.2.
- Ardila, Mike. 2017. "Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Produk Domestik Bruto Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Buton Kota". *Jurnal Riset Universitas Bosowa Makassar*. Vol.3 No.3.
- Arshanti, K.N., Wirathi, I.G. 2015. "Pengaruh Investasi Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Mediasi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali". *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 4(5): 513-524.
- Assadzadeh, Ahmad., & Pourqoly, Javad. 2013. "The Relationship between Foreign Direct Investment, Institutional Quality and Poverty: Case of MENA Countries". *Journal of Economics, Business and Management*. Vol.1 No.2.
- Astrini, N.M., & Perbadharmaja, I.B. 2013. "Pengaruh PDRB, Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali". *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 2(8): 384-392.
- Badan Pusat Statistik. *Berita Resmi Statistik*. BPS. Jawa Tengah. (Publikasi Online).
- Badan Pusat Statistik. *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2017*. BPS. Jakarta-Indonesia. (Publikasi Online).
- Badan Pusat Statistik. *Indeks Pembangunan Manusia 2017 Metode Baru*. BPS. Jakarta-Indonesia. (Publikasi Online).
- Badan Pusat Statistik. *Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Jawa Tengah 2012-2017*. BPS. Jawa Tengah. (Publikasi Online).

- Badan Pusat Statistik. *Tinjauan Regional PDRB Berdasarkan Kabupaten/Kota Jawa Tengah 2012-2017: Pulau Jawa dan Bali*. BPS. Jakarta Indonesia. (Publikasi Online).
- BPS. *Jawa Tengah Dalam Angka 2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019*. BPS. Jawa Tengah.
- Budhijana, R.B. 2019. "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Index Pembangunan Manusia (IPM) dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2000-2017". *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Perbankan*, 5(1): 36-44.
- Dama, Y.H., Lapian, A.L., & Sumual, J.I. 2016. "Pengaruh PDRB Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Manado Tahun 2005-2014". *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Vol.16 No.3.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017. LGF Anggaran Fungsi. Kementerian Keuangan RI.
- Fadillah, N., Sukiman., & Dewi, A.S. 2016. "Analisis Pengaruh Pendapatan Perkapita, Tingkat Pengangguran, IPM, dan Pertumbuhan Penduduk, Terhadap kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2009-2013". *Eko-Regional*. Vol.11 No.1.
- Febrianty, Hastina & Nurwanti. 2017. "Pengaruh Pendapatan Perkapita, Investasi dan Inflasi Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara". *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*. Vol.03 No.2.
- Feriyanto, Nur. 2016. "The effect of employment, economic growth, and investment on HDI: In provinces in Indonesia". *Journal of Economics, Business, and Accountancy Ventura*. Vol.19 No.1.
- Giovanni, Ridzky. 2018. "Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran dan Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2009-2016". *Economics Development Analysis Journal*, 7(2): 23-31.
- Gujarati, D.N. dan D.C. Porter. 2012. *Dasar-Dasar Ekonometrika, Edisi 5 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- _____. 2012. *Dasar-Dasar Ekonometrika, Edisi 5 Buku 2*. Jakarta: Salemba Empat.

- Hodijah, S. 2017. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, PAD Terhadap Kemiskinan Melalui Kesempatan Kerja di Provinsi Jambi". *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia*. Vol.4 No.2.
- Iskandar, S., & Mahmud, A. 2010. "Karakteristik dan Akar Masalah Kemiskinan (Kasus pada 4 Tipologi Desa di Kabupaten Sumbawa)". *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 11(1): 122-134.
- Jauch, Herbert. 2013. "Poverty, Unemployment and Inequality in Namibia". *TEMTI Series of Economic Perspectives on Global Sustainability*. EP 02.
- Kotambunan, L., Palar, S.W., & Tumilaar, R.L. 2016. "Analisis Pengaruh Belanja Modal dan IPM Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005-2014". *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Vol.16 No.1.
- Kuncoro, Mudrajat. 2017. *Ekonomika Pembangunan: Teori, Masalah Dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- _____. 2007. *Metode Kuantitatif: Teori dan Aplikasinya Untuk Bisnis dan Ekonomi Edisi ke Tiga*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- _____. 2013. *Mudah Memahami dan Menganalisis Indikator Ekonomi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Leonita, L., & Sari, R.K. 2019. "Pengaruh PDRB, Pengangguran, dan Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di Indonesia". *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 3(2): 1-8.
- Lutfi, A.F., Wibisono., & Yuliati, L. 2016. "Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota, IPM dan Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di provinsi Jawa Timur Periode 2006-2013". *Artikel Ilmiah Mahasiswa Universitas Jember*.
- Madan, Sonu. 2012. "Human Development and Poverty- a Perspective Across Indian States". *Statistika*, 49(4): 81-94.
- Magombeyi, M.T. & Odhiambo, N.M. 2017. "Foreign Direct Investment And Poverty Reduction". *Comparative Economic Research*. Vol.20 No.2.
- Marmujiono, S.P. 2014. "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan dan Strategi Pengentasan Kemiskinan di Kab. Brebes Tahun 2009-2011". *Economics Development Analysis Journal*, 3(1): 159-172.

- Martani. 2014. “Dampak Pendapatan Daerah, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Penduduk Miskin Pada Kawasan Purwomangun Jawa Tengah”. *Jurnal Universitas Gunadarma*. Vol.8 No.5.
- Masniadi, R., Fitriyani, I., & Oktaviani, S. 2017. “Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto dan Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Sumbawa Barat”. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol.14 No.1.
- Megawati, E., & Sebayang, L.K. 2018. “Determinan Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014”. *Economics Development Analysis Journal*, 7(3): 235-242.
- Meriyanti, N.K. 2015. “Pengaruh Program Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan buleleng Tahun 2011-2014”. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*. Vol.3 No.1.
- Mirza, D.S. 2011. “Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal Terhadap IPM Jawa Tengah”. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan*, 9(2): 102-113.
- Mulyasari, Andini. 2016. “Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Angkatan yang Bekerja Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2010-2014”. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan*, 4(2): 122-131.
- Mustaqimah, K., Hartoyo, S., & Fahmi, I. 2017. “Peran Belanja Modal Pemerintah dan Investasi Pembangunan Manusia Dalam Mengurangi Tingkat Kemiskinan di Indonesia”. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, 6(2): 1-15.
- Muttaqin, Zaenal. 2012. “Economic Growth And Equality in Reducing Poverty”. *Signifikan*. Vol.1 No.1.
- Ningsih, Feby, A., & Syechalad, M.N. 2016. “Analisis Pengaruh Pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di Aceh”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Unsyiah*, 1(2): 545-554.
- Novita, U.D., & Istiqamah, N. 2017. “Pengaruh PDRB, Pendidikan, dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Sambas”. *Jurnal Manajemen Motivasi*. Vol. 13 No.1.

- Octasari, T. 2016. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, dan Tingkat Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2009-2013". *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi*. Vol.5 No.6.
- Pambudi, R.I., Saleh, M., & Priyono, T.H. 2016. "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Regional, dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di provinsi Jawa Timur". *Artikel Ilmiah Mahasiswa Universitas Jember*.
- Parasan, P., Rotinsulu, D., & Layuck, I. 2016. "Analisis Belanja Pemerintah dan Investasi Swasta Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara". *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Vol.16 No.2.
- Parwata, I.M., Swendra, I.W., & Yudiatmaja, F. 2016. "Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan". *e-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha*. Vol.4.
- Prasetyo, A. 2015. "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Swasta Terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah". *Jurnal Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, 8(2): 191-212.
- Pujiati, Amin. 2009. "Analisis Kawasan Andalan di Jawa Tengah". *Jurnal Aset*, 11(2): 117-128.
- Rahayu, Y. 2018. "Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, PDRB Per Kapita, dan Jumlah Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jambi". *Jurnal of Economics and Business*. Vol.2 No.1.
- Rauf, A.A. 2016. "Kapasitas Fiskal dan PDRB dengan Tingkat Kemiskinan: Studi Pada Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah". *e Jurnal Katalogis*. Vol.04 No.10.
- Rinawati, A., Rusdarti, & Soesilowati, E. 2017. "A Strategy of Poverty Reduction Based on Social Capital". *International Journal of Economic Research*. Vol.4 No.6.
- Rusdarti & Sebayang, L.K. 2013. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah". *Jurnal Economia*, 9(1): 1-9.

- Sari, D.S., Subagiarta, I.W., & Badjuri. 2012. "Pengaruh Produk Domestik Regional Brutto dan Tingkat Angka Buta Huruf Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Bondowoso". *Artikel Ilmiah Mahasiswa Universitas Jember*.
- Sari, N.I. 2018. "Determinan Tingkat Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007-2014". *Economics Development Analysis Journal*, 7(2): 128-136.
- Segoro, W., & Pou, M.A. 2016. "Analisis pengaruh PDRB, Inflasi, IPM dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 2009-2012". *Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan PKM Sosial, Ekonomi dan Humaniora*. Vol.6 No.1.
- Sofilda, Eleonora., Hamzah, Z., Syaman, A., & Muhamad. 2013. "Human Development and Poverty in Papua Province". *OIDA International Journal of Sustainable Development*. Vol.6 No.6.
- Sudantoko, D., & Mariyono, J. 2010. "Tinjauan Teoritis Pembangunan Pedesaan yang berkelanjutan: Pengentasan Kemiskinan dan Perbaikan Kualitas Lingkungan". *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan*, 3(2): 132-142.
- Sudarlan. 2015. "Contribution Of Human Development Index On Per Capita Income Growth And Poverty Alleviation In Indonesia". *International Journal Of Scientific & Technology Research*, 4(8): 173-178.
- Sudiharta, P.S., & Sutrisna, K. 2013. "Pengaruh PDRB Perkapita, Pendidikan dan Produktivitas Terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali". *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 3(10): 431-439.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Suliswanto, M.S. 2010. "Pengaruh PDRB dan IPM Terhadap Angka Kemiskinan di Indonesia". *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8(2): 357-366.
- Susanti, Sussy. 2013. "Pengaruh Produk Domestik Bruto, Pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di Jawa Barat dengan Menggunakan Analisis Data Panel". *Jurnal Matematika Integratif*, 9(1): 1-18.

- Wahyuningsih, Y.E. 2014. “analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Nagan Raya”. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia*. Vol.1 No.1.
- Wiradyatmika, A.A., & Suidiana, I.K. 2013. “Pengaruh PDRB, Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali”. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 2(6): 344-349.
- Wirawan, I.M., & Arka, S. 2015. “Analisis Pengaruh Pendidikan, PDRB Per Kapita dan Tingkat Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Bali”. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 4(5): 546-560.
- Yanthi, C.I., & Marhaeni, A.A. 2015. “Pengaruh Pendidikan, tingkat Upah dan Pengangguran Terhadap Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Bali”. *Jurnal Kependudukan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, 11(2): 68-75.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Jumlah Penduduk Miskin kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah (jiwa)

Kab/Kota	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kab. Cilacap	255,700	239,800	243,500	240,200	238,300	193,182
Kab. Banyumas	296,800	283,500	285,900	283,900	283,200	226,231
Kab. Purbalingga	181,100	176,000	176,500	171,800	171,900	144,157
Kab. Banjarnegara	166,800	159,500	165,400	158,200	156,800	141,718
Kab. Kebumen	251,100	242,300	241,900	235,900	233,400	208,662
Kab. Purworejo	109,000	102,100	101,200	99,100	98,600	83,550
Kab. Wonosobo	170,100	165,800	166,400	160,100	159,200	138,321
Kab. Magelang	171,000	160,500	162,400	158,900	157,200	143,435
Kab. Boyolali	126,500	118,600	120,000	117,000	116,400	98,228
Kab. Klaten	179,500	168,200	172,300	168,000	165,000	151,732
Kab. Sukoharjo	84,100	78,900	79,900	78,900	76,700	65,432
Kab. Wonogiri	132,200	123,800	123,000	124,800	123,000	102,835
Kab. Karanganyar	114,400	107,300	106,400	107,700	106,800	87,792
Kab. Sragen	139,000	130,300	130,400	126,800	124,000	116,369
Kab. Grobogan	199,000	186,500	184,500	184,100	181,000	168,701
Kab. Blora	123,800	116,000	115,000	113,900	111,900	102,496
Kab. Rembang	128,000	120,000	119,100	115,500	115,200	97,437
Kab. Pati	157,900	148,100	147,100	144,200	141,700	123,935
Kab. Kudus	70,100	65,800	64,100	64,200	64,400	59,985
Kab. Jepara	106,900	100,500	100,600	100,300	99,000	86,538
Kab. Demak	172,500	162,000	160,900	158,800	152,600	144,119
Kab. Semarang	83,200	79,800	81,200	80,700	79,700	75,668
Kab. Temanggung	91,100	85,500	87,500	87,100	86,800	75,394
Kab. Kendal	117,700	110,500	109,300	107,800	106,100	94,697
Kab. Batang	87,500	82,100	83,500	82,600	81,500	66,078
Kab. Pekalongan	116,500	109,300	112,100	113,300	111,600	89,538
Kab. Pemasang	246,800	237,000	235,500	227,100	225,000	208,336
Kab. Tegal	149,800	140,300	143,500	144,200	141,800	114,058
Kab. Brebes	367,900	355,100	352,000	348,000	343,500	309,168
Kota Magelang	11,800	11,000	10,900	10,600	10,600	9,585
Kota Surakarta	59,700	55,900	55,700	55,900	54,900	46,988
Kota Salatiga	11,500	10,800	10,600	9,700	9,600	9,235
Kota Semarang	86,700	84,700	84,300	83,600	80,900	73,645
Kota Pekalongan	24,100	23,600	24,100	23,600	22,500	20,516
Kota Tegal	21,600	20,900	20,300	20,300	20,100	19,436

Sumber: BPS Jawa Tengah Dalam Angka 2019

Lampiran 2. Nilai IPM kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah (persen)

Kab/Kota	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kab. Cilacap	66.80	67.25	67.77	68.60	68.90	69.56
Kab. Banyumas	68.55	69.25	69.89	70.49	70.75	71.30
Kab. Purbalingga	65.53	66.23	67.03	67.48	67.72	68.41
Kab. Banjarnegara	62.84	63.15	64.73	65.52	65.86	66.54
Kab. Kebumen	64.86	65.67	66.87	67.41	68.29	68.80
Kab. Purworejo	69.77	70.12	70.37	70.66	71.31	71.87
Kab. Wonosobo	64.57	65.20	65.70	66.19	66.89	67.81
Kab. Magelang	65.86	66.35	67.13	67.85	68.39	69.11
Kab. Boyolali	69.81	70.34	71.74	72.18	72.64	73.22
Kab. Klaten	72.42	73.19	73.81	73.97	74.25	74.79
Kab. Sukoharjo	73.22	73.76	74.53	75.06	75.56	76.07
Kab. Wonogiri	66.40	66.77	67.76	68.23	68.66	69.37
Kab. Karanganyar	73.33	73.89	74.26	74.90	75.22	75.54
Kab. Sragen	69.95	70.52	71.10	71.43	72.40	72.96
Kab. Grobogan	67.43	67.77	68.05	68.52	68.87	69.32
Kab. Blora	65.37	65.84	66.22	66.61	67.52	67.95
Kab. Rembang	66.84	67.40	68.18	68.60	68.95	69.46
Kab. Pati	66.47	66.99	68.51	69.03	70.12	70.71
Kab. Kudus	71.58	72.00	72.72	72.94	73.84	74.58
Kab. Jepara	69.11	69.61	70.02	70.25	70.79	71.38
Kab. Demak	68.38	68.95	69.75	70.10	70.41	71.26
Kab. Semarang	71.29	71.65	71.89	72.40	73.20	73.61
Kab. Temanggung	65.52	65.97	67.07	67.60	68.34	68.83
Kab. Kendal	67.98	68.46	69.57	70.11	70.62	71.28
Kab. Batang	63.60	64.07	65.46	66.38	67.35	67.86
Kab. Pekalongan	66.26	66.98	67.40	67.71	68.40	68.97
Kab. Pemalang	61.81	62.35	63.70	64.17	65.04	65.67
Kab. Tegal	63.50	64.10	65.04	65.84	66.44	67.33
Kab. Brebes	61.87	62.55	63.18	63.98	64.86	65.68
Kota Magelang	75.29	75.79	76.39	77.16	77.84	78.31
Kota Surakarta	78.89	79.34	80.14	80.76	80.85	81.46
Kota Salatiga	79.37	79.98	80.96	81.14	81.68	82.41
Kota Semarang	78.68	79.24	80.23	81.19	82.01	82.72
Kota Pekalongan	70.82	71.53	72.69	73.32	73.77	74.24
Kota Tegal	71.44	72.20	72.96	73.55	73.95	74.44

Sumber: BPS Jawa Tengah Dalam Angka 2019

Lampiran 3. PDRB ADHK 2010 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah (milyar rupiah)

Kab/Kota	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kab. Cilacap	81,023	83,392	88,358	92,859	95,264	98,173
Kab. Banyumas	27,793	29,368	31,165	33,051	35,147	37,415
Kab. Purbalingga	12,778	13,398	14,131	14,816	15,612	16,459
Kab. Banjarnegara	11,043	11,630	12,266	12,933	13,663	14,438
Kab. Kebumen	14,333	15,163	16,116	16,924	17,792	18,774
Kab. Purworejo	9,871	10,313	10,863	11,422	12,028	12,668
Kab. Wonosobo	10,334	10,828	11,334	11,941	12,405	13,018
Kab. Magelang	17,021	17,936	18,865	19,882	20,937	22,075
Kab. Boyolali	16,266	17,148	18,170	19,139	20,249	21,407
Kab. Klaten	20,241	21,425	22,559	23,726	24,990	26,381
Kab. Sukoharjo	19,402	20,449	21,612	22,848	24,164	25,571
Kab. Wonogiri	15,303	16,108	16,977	17,869	18,820	19,839
Kab. Karanganyar	19,257	20,262	21,286	22,436	23,732	25,150
Kab. Sragen	19,102	20,170	21,391	22,626	23,977	25,355
Kab. Grobogan	14,475	15,064	15,963	16,683	17,659	18,702
Kab. Blora	11,713	12,227	12,883	15,915	16,866	17,608
Kab. Rembang	9,781	10,284	10,850	11,423	12,139	12,855
Kab. Pati	22,330	23,365	24,770	26,130	27,609	29,195
Kab. Kudus	59,945	62,601	65,030	66,680	68,818	71,048
Kab. Jepara	15,624	16,375	17,210	18,081	19,055	20,170
Kab. Demak	13,499	14,078	14,913	15,672	16,584	17,474
Kab. Semarang	25,758	27,264	28,768	30,292	32,004	33,858
Kab. Temanggung	11,299	11,868	12,489	13,116	13,755	14,452
Kab. Kendal	22,386	23,537	24,762	26,139	27,666	29,186
Kab. Batang	11,105	11,694	12,328	12,948	13,667	14,449
Kab. Pekalongan	12,035	12,630	13,235	13,922	14,679	15,525
Kab. Pemalang	13,172	13,899	14,674	15,470	16,344	17,287
Kab. Tegal	18,050	18,959	19,999	21,183	22,322	23,553
Kab. Brebes	23,812	25,074	26,573	27,931	29,527	31,095
Kota Magelang	4,755	4,992	5,247	5,522	5,821	6,146
Kota Surakarta	25,632	26,984	28,453	29,976	31,685	33,506
Kota Salatiga	6,989	7,378	7,759	8,168	8,629	9,105
Kota Semarang	96,985	103,110	109,111	115,543	123,107	131,137
Kota Pekalongan	5,456	5,755	6,043	6,367	6,706	7,088
Kota Tegal	8,084	8,491	8,954	9,445	10,007	10,599

Sumber: BPS Jawa Tengah Dalam Angka 2019

Lampiran 4. Tingkat Pengangguran kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah (persen)

Kab/Kota	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kab. Cilacap	6.68	5.65	8.01	6.91	6.30	7.48
Kab. Banyumas	5.45	5.37	6.37	5.03	4.62	4.19
Kab. Purbalingga	5.63	5.13	4.84	5.46	5.33	6.06
Kab. Banjarnegara	4.16	4.06	5.05	4.41	4.72	4.00
Kab. Kebumen	3.52	3.25	4.14	4.70	5.58	5.52
Kab. Purworejo	5.15	5.10	4.01	4.36	3.64	4.51
Kab. Wonosobo	5.82	5.34	4.47	4.38	4.18	3.44
Kab. Magelang	6.13	7.45	5.16	4.27	2.44	2.91
Kab. Boyolali	5.44	4.95	2.03	3.33	3.67	2.16
Kab. Klaten	5.34	4.75	2.51	3.82	4.35	3.11
Kab. Sukoharjo	5.98	4.60	4.52	3.62	2.27	2.78
Kab. Wonogiri	3.61	3.45	3.07	2.78	2.38	2.28
Kab. Karanganyar	3.84	3.54	3.60	3.14	3.17	2.34
Kab. Sragen	5.63	6.04	4.51	4.97	4.55	4.82
Kab. Grobogan	6.10	4.25	5.22	3.75	3.02	2.24
Kab. Blora	6.23	4.30	4.68	3.92	2.85	3.26
Kab. Rembang	5.97	5.23	4.51	3.97	3.19	2.87
Kab. Pati	7.29	6.37	4.43	4.66	3.83	3.61
Kab. Kudus	8.07	5.03	5.04	4.52	3.56	3.33
Kab. Jepara	6.34	5.09	3.12	4.42	4.84	3.78
Kab. Demak	7.08	5.17	6.02	5.95	4.47	7.16
Kab. Semarang	3.90	4.38	2.57	2.71	1.78	2.28
Kab. Temanggung	4.87	3.19	1.50	3.03	2.97	3.24
Kab. Kendal	6.43	6.15	7.07	6.02	4.93	6.06
Kab. Batang	7.02	7.42	4.56	5.50	5.82	4.23
Kab. Pekalongan	4.78	6.03	5.10	4.82	4.39	4.41
Kab. Pemasang	6.48	7.44	6.53	6.33	5.59	6.21
Kab. Tegal	6.89	8.47	9.52	8.18	7.33	8.45
Kab. Brebes	9.61	9.53	6.49	7.94	8.04	7.27
Kota Magelang	6.75	7.38	6.43	6.22	6.68	4.88
Kota Surakarta	7.22	6.16	4.53	5.03	4.47	4.39
Kota Salatiga	6.21	4.46	6.43	4.85	3.96	4.28
Kota Semarang	6.02	7.76	5.77	6.18	6.61	5.29
Kota Pekalongan	5.28	5.42	4.10	5.27	5.05	6.13
Kota Tegal	9.32	9.20	8.06	8.38	8.19	7.94

Sumber: BPS Jawa Tengah Dalam Angka 2019

Lampiran 5. Investasi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah (miliar rupiah)

Kab/Kota	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kab. Cilacap	76.89	57.42	47.22	47.10	65.65	148.96
Kab. Banyumas	127.32	2,828.82	135.42	132.23	508.93	626.39
Kab. Purbalingga	1,345.68	163.15	612.41	5,525.03	6,165.80	15,886.47
Kab. Banjarnegara	452.16	689.87	2.14	0.20	186.28	77.58
Kab. Kebumen	27.43	609.78	978.86	1,273.19	653.22	1,345.48
Kab. Purworejo	6.22	44.75	169.63	243.64	420.79	1,453.10
Kab. Wonosobo	7,490.90	6,385.75	4,416.43	12,204.00	474.39	4,946.35
Kab. Magelang	191.44	594.32	1,062.77	1,242.14	972.39	789.93
Kab. Boyolali	129.46	166.12	2,423.78	132.60	568.68	865.20
Kab. Klaten	71.56	891.59	520.36	1,691.50	14,183.82	13,921.01
Kab. Sukoharjo	407.75	83.68	420.55	1,875.25	1,957.68	1,103.31
Kab. Wonogiri	136.75	80.49	103.87	88.15	29.67	71.42
Kab. Karanganyar	182.76	0.18	559.29	681.50	99.38	1,230.60
Kab. Sragen	17.82	5.74	20.60	148.01	386.29	276.75
Kab. Grobogan	75.01	845.20	1,271.30	881.54	1,068.33	688.92
Kab. Blora	46.50	47.36	0.83	34.15	218.81	167.00
Kab. Rembang	17.28	99.39	136.61	1,326.97	943.65	108.65
Kab. Pati	93.43	37.97	283.75	1,373.70	5,907.35	1,250.08
Kab. Kudus	4.21	12.13	14.31	272.85	17.53	120.86
Kab. Jepara	4.97	13.51	60.11	41.56	4,964.10	196.85
Kab. Demak	33.42	45.34	61.51	83.45	24.64	113.21
Kab. Semarang	2,684.28	12.54	2,711.02	1,560.47	135.25	680.66
Kab. Temanggung	96.27	830.46	2,223.30	611.81	1,674.48	2,428.27
Kab. Kendal	82.51	767.39	143.56	1,006.15	1,021.51	2,519.05
Kab. Batang	2,992.11	2,066.45	3,670.31	2,394.34	2,407.75	1,922.69
Kab. Pekalongan	6.56	18.39	39.75	123.24	1,832.57	263.02
Kab. Pemalang	3.46	3.90	13.80	138.18	165.80	231.54
Kab. Tegal	10.36	117.85	472.23	304.18	130.61	44.42
Kab. Brebes	11.15	10.95	16.26	12.87	12.43	16.15
Kota Magelang	3.25	146.49	10.79	14.51	272.70	13.85
Kota Surakarta	46.50	3.22	6.91	15.62	51.26	96.12
Kota Salatiga	38.19	258.00	10.16	497.38	529.72	268.98
Kota Semarang	1,401.91	1,318.43	4,536.83	1,868.54	3,846.60	9,233.76
Kota Pekalongan	251.91	257.29	96.17	158.78	74.36	384.66
Kota Tegal	5.98	4.85	5.43	11.66	36.55	29.72

Sumber: BPS Jawa Tengah Dalam Angka 2019

Lampiran 6. Dummy

Kab/Kota	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kab. Cilacap	0	0	1	0	0	0
Kab. Banyumas	0	0	0	0	0	0
Kab. Purbalingga	0	0	0	0	0	0
Kab. Banjarnegara	0	0	0	0	0	0
Kab. Kebumen	0	0	0	0	0	0
Kab. Purworejo	0	0	0	0	0	0
Kab. Wonosobo	0	0	0	0	0	0
Kab. Magelang	0	0	0	0	0	0
Kab. Boyolali	0	0	0	0	0	0
Kab. Klaten	0	0	0	0	0	0
Kab. Sukoharjo	1	1	1	0	1	1
Kab. Wonogiri	0	0	0	0	0	0
Kab. Karanganyar	1	1	0	0	1	1
Kab. Sragen	0	0	0	0	1	1
Kab. Grobogan	0	0	0	0	0	0
Kab. Blora	0	0	0	0	0	0
Kab. Rembang	0	0	0	0	0	0
Kab. Pati	0	0	0	0	0	0
Kab. Kudus	0	0	0	0	0	0
Kab. Jepara	0	0	0	0	0	0
Kab. Demak	0	0	0	0	0	0
Kab. Semarang	1	1	1	0	1	1
Kab. Temanggung	0	0	0	0	0	0
Kab. Kendal	1	1	0	0	1	1
Kab. Batang	0	0	0	0	0	0
Kab. Pekalongan	0	0	0	0	0	0
Kab. Pemasang	0	0	0	0	0	0
Kab. Tegal	0	0	0	0	0	0
Kab. Brebes	0	0	0	0	0	0
Kota Magelang	1	0	0	0	0	1
Kota Surakarta	1	1	0	0	1	1
Kota Salatiga	1	1	0	0	1	1
Kota Semarang	1	1	1	1	1	1
Kota Pekalongan	0	0	0	0	0	0
Kota Tegal	1	0	0	0	1	1

Sumber: BPS Jawa Tengah Dalam Angka 2019

Lampiran 7. Hasil Output Perhitungan Regresi Utama

Dependent Variable: PM?
 Method: Pooled Least Squares
 Date: 04/02/20 Time: 16:43
 Sample: 2013 2018
 Included observations: 6
 Cross-sections included: 35
 Total pool (balanced) observations: 210

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	531034.3	133159.2	3.987966	0.0001
IPM?	-5576.608	1852.866	-3.009721	0.0030
PDRB?	-3.51E-10	1.22E-10	-2.883525	0.0044
TP?	-516.4141	561.4541	-0.919780	0.3590
INV?	-3.56E-10	1.15E-10	-3.110808	0.0022
DUMMY?	-785.3128	2354.705	-0.333508	0.7392
Fixed Effects (Cross)				
_CILACAP--C	119333.0			
_BANYUMAS--C	150406.3			
_PURBALINGGA--C	22870.72			
_BANJARNEGARA--C	-4948.555			
_KEBUMEN--C	86436.19			
_PURWOREJO--C	-31563.76			
_WONOSOBO--C	5941.259			
_MAGELANG--C	13561.93			
_BOYOLALI--C	-6634.465			
_KLATEN--C	59694.49			
_SUKOHARJO--C	-26249.87			
_WONOGIRI--C	-23291.35			
_KARANGANYAR--C	-275.1530			
_SRAGEN--C	5608.082			
_GROBOGAN--C	42131.32			
_BLORA--C	-38561.38			
_REMBANG--C	-28312.09			
_PATI--C	7661.444			
_KUDUS--C	-33866.40			
_JEPARA--C	-31700.86			
_DEMAK--C	25248.28			
_SEMARANG--C	-34534.08			
_TEMANGGUNG--C	-64011.04			
_KENDAL--C	-21830.63			
_BATANG--C	-75272.75			
_PEKALONGAN--C	-37745.03			
_PEMALANG--C	63321.92			
_TEGAL--C	-15994.44			
_BREBES--C	183873.1			
_KMAGELANG--C	-86532.49			
_KSURAKARTA--C	-15135.07			
_KSALATIGA--C	-63490.44			
_KSEMARANG--C	46251.43			
_KPEKALONGAN--C	-97436.29			
_KTEGAL--C	-94953.48			

Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.991798	Mean dependent var	127644.3
Adjusted R-squared	0.989916	S.D. dependent var	74034.77
S.E. of regression	7434.351	Akaike info criterion	20.83525
Sum squared resid	9.40E+09	Schwarz criterion	21.47280
Log likelihood	-2147.702	Hannan-Quinn criter.	21.09299
F-statistic	527.0967	Durbin-Watson stat	1.600245
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Olah data E -views 10

Lampiran 8. Hasil output E-views dengan pendekatan *Common Effect Model*

Dependent Variable: PM?
 Method: Pooled Least Squares
 Date: 04/02/20 Time: 15:58
 Sample: 2013 2018
 Included observations: 6
 Cross-sections included: 35
 Total pool (balanced) observations: 210

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	878958.3	71164.10	12.35115	0.0000
IPM?	-11149.98	994.4013	-11.21276	0.0000
PDRB?	1.14E-09	1.78E-10	6.423661	0.0000
TP?	1251.975	2264.968	0.552756	0.5810
INV?	7.87E-10	1.61E-09	0.489296	0.6252
DUMMY?	-10692.41	11395.11	-0.938333	0.3492
R-squared	0.503961	Mean dependent var		127644.3
Adjusted R-squared	0.491803	S.D. dependent var		74034.77
S.E. of regression	52777.85	Akaike info criterion		24.61373
Sum squared resid	5.68E+11	Schwarz criterion		24.70936
Log likelihood	-2578.441	Hannan-Quinn criter.		24.65239
F-statistic	41.45161	Durbin-Watson stat		0.037279
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Olah data E -views 10

Lampiran 9. Hasil output E-views dengan pendekatan *Fixed Effect Model*

Dependent Variable: PM?
 Method: Pooled Least Squares
 Date: 04/02/20 Time: 16:43
 Sample: 2013 2018
 Included observations: 6
 Cross-sections included: 35
 Total pool (balanced) observations: 210

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	531034.3	133159.2	3.987966	0.0001
IPM?	-5576.608	1852.866	-3.009721	0.0030
PDRB?	-3.51E-10	1.22E-10	-2.883525	0.0044
TP?	-516.4141	561.4541	-0.919780	0.3590
INV?	-3.56E-10	1.15E-10	-3.110808	0.0022
DUMMY?	-785.3128	2354.705	-0.333508	0.7392
Fixed Effects (Cross)				
_CILACAP--C	119333.0			
_BANYUMAS--C	150406.3			
_PURBALINGGA--C	22870.72			
_BANJARNEGARA--C	-4948.555			
_KEBUMEN--C	86436.19			
_PURWOREJO--C	-31563.76			
_WONOSOBO--C	5941.259			
_MAGELANG--C	13561.93			
_BOYOLALI--C	-6634.465			
_KLATEN--C	59694.49			
_SUKOHARJO--C	-26249.87			
_WONOGIRI--C	-23291.35			
_KARANGANYAR--C	-275.1530			
_SRAGEN--C	5608.082			
_GROBOGAN--C	42131.32			
_BLORA--C	-38561.38			
_REMBANG--C	-28312.09			
_PATI--C	7661.444			
_KUDUS--C	-33866.40			
_JEPARA--C	-31700.86			
_DEMAK--C	25248.28			
_SEMARANG--C	-34534.08			
_TEMANGGUNG--C	-64011.04			
_KENDAL--C	-21830.63			
_BATANG--C	-75272.75			
_PEKALONGAN--C	-37745.03			
_PEMALANG--C	63321.92			
_TEGAL--C	-15994.44			
_BREBES--C	183873.1			
_KMAGELANG--C	-86532.49			
_KSURAKARTA--C	-15135.07			
_KSALATIGA--C	-63490.44			
_KSEMARANG--C	46251.43			
_KPEKALONGAN--C	-97436.29			
_KTEGAL--C	-94953.48			

Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.991798	Mean dependent var	127644.3
Adjusted R-squared	0.989916	S.D. dependent var	74034.77
S.E. of regression	7434.351	Akaike info criterion	20.83525
Sum squared resid	9.40E+09	Schwarz criterion	21.47280
Log likelihood	-2147.702	Hannan-Quinn criter.	21.09299
F-statistic	527.0967	Durbin-Watson stat	1.600245
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Olah data E -views 10

Lampiran 10. Hasil output E-views dengan pendekatan *Random Effect Model*

Dependent Variable: PM?
 Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 04/02/20 Time: 16:44
 Sample: 2013 2018
 Included observations: 6
 Cross-sections included: 35
 Total pool (balanced) observations: 210
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	592415.3	47973.87	12.34871	0.0000
IPM?	-6583.916	692.4383	-9.508307	0.0000
PDRB?	6.67E-11	2.31E-10	0.288389	0.7733
TP?	-593.5746	635.6592	-0.933794	0.3515
INV?	-4.05E-10	3.11E-10	-1.301859	0.1944
DUMMY?	-1033.881	2143.098	-0.482424	0.6300
Random Effects				
(Cross)				
_CILACAP--C	89377.29			
_BANYUMAS--C	146079.9			
_PURBALINGGA--C	23565.53			
_BANJARNEGARA--C	-6003.631			
_KEBUMEN--C	85760.48			
_PURWOREJO--C	-25981.54			
_WONOSOBO--C	6866.316			
_MAGELANG--C	12364.23			
_BOYOLALI--C	-3338.774			
_KLATEN--C	63266.87			
_SUKOHARJO--C	-21095.21			
_WONOGIRI--C	-23317.38			
_KARANGANYAR--C	4640.174			
_SRAGEN--C	7369.721			
_GROBOGAN--C	42945.03			
_BLORA--C	-38500.91			
_REMBANG--C	-25217.50			
_PATI--C	5186.352			
_KUDUS--C	-48683.78			
_JEPARA--C	-29307.55			
_DEMAK--C	28146.79			
_SEMARANG--C	-34836.06			
_TEMANGGUNG--C	-62549.59			
_KENDAL--C	-22982.09			
_BATANG--C	-74901.47			
_PEKALONGAN--C	-36218.12			
_PEMALANG--C	60196.76			
_TEGAL--C	-19466.37			
_BREBES--C	175341.2			
_KMAGELANG--C	-72026.39			
_KSURAKARTA--C	-7361.427			
_KSALATIGA--C	-45998.79			
_KSEMARANG--C	19721.41			

_KPEKALONGAN--C	-87494.28		
_KTEGAL--C	-85547.24		
Effects Specification			
		S.D.	Rho
Cross-section random		56078.10	0.9827
Idiosyncratic random		7434.351	0.0173
Weighted Statistics			
R-squared	0.478224	Mean dependent var	6898.272
Adjusted R-squared	0.465436	S.D. dependent var	10348.06
S.E. of regression	7565.872	Sum squared resid	1.17E+10
F-statistic	37.39450	Durbin-Watson stat	1.301807
Prob(F-statistic)	0.000000		
Unweighted Statistics			
R-squared	0.352719	Mean dependent var	127644.3
Sum squared resid	7.41E+11	Durbin-Watson stat	0.020501

Sumber: Olah data E -views 10

Lampiran 11. Hasil Output Uji *Chow Test* dan Uji *Hausman Test*Uji *Chow Test*

Redundant Fixed Effects Tests

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	297.390757	(34,170)	0.0000
Cross-section Chi-square	861.479255	34	0.0000

Sumber: Olah data E -views 10

Uji *Hausman Test*

Correlated Random Effects - Hausman Test

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	12.281798	5	0.0311

Sumber: Olah data E -views 10